



RENTRA

Re nca na St r a t e g i s



2021 - 2026

DI NAS KOPERASI, USAHA M I KRO DAN
TENAGA KERJA

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud	8
1.4 Tujuan.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	16
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	16
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	29
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	46
3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	48
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	50
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	53
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
5.1 Strategi	56
5.2 Kebijakan.....	57
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	62
6.1 Program	62
6.2 Kegiatan.....	63
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	170
BAB VIII PENUTUP.....	172

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.....	29
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Yang Menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2021.....	30
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021	30
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021	31
Tabel 2.5 Jumlah Sarana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2021	32
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020	39
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020.....	45
Tabel T-B35 Pemetaan Permasalahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.....	47
Tabel T-C25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	55
Tabel T-C26 Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	60
Tabel T-C27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026.....	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	11
Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategus Perangkat Daerah Tahun 2026	12
Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Tahun 2021-2025	13
Gambar 2.1 Peta Jabatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.....	28

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya berkat Karunia-Nya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dapat menyusun Rencana Strategis Tahun 2021 -2026 dan selesai tepat waktu. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin merupakan dokumen penting dalam rangka mencapai keharmonisan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan sinergis dengan sektor lainnya dalam mencapai tujuan pembangunan. Dokumen ini digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan sektor koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja Kota Banjarmasin dalam menyusun program dan kegiatan tahunan (Rencana Kerja).

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin harus cepat mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan organisasi. Perubahan dilakukan dengan maksud agar indikator yang disusun dalam Renstra menjadi lebih SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bounded*). Begitu pentingnya Rencana Strategis ini sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin untuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik dan berorientasi pada hasil.

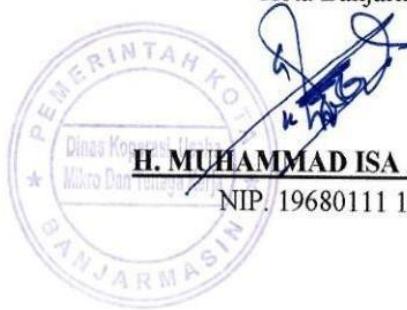
Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai

instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2021 - 2026.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rencana Strategis ini dapat tersusun, disampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja di Kota Banjarmasin

Banjarmasin, Desember 2021

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
Kota Banjarmasin



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin harus terus-menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Renstra SKPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sementara itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang tercantum dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 menyebutkan bahwa Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan tahapan yang telah diatur.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan di bidang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Adapun uraian tersebut yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja menyusun dan menetapkan Renstra Tahun 2021-2026. Renstra yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin merupakan salah satu perangkat daerah di Kota Banjarmasin yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin harus berperan aktif dalam mengambil inisiatif dalam urusan yang menjadi kewenangannya seusai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Menindaklanjuti ditetapkannya RPJMD Kota Banjarmasin 2021-2026 maka setiap perangkat daerah di Kota Banjarmasin diwajibkan membuat perencanaan strategis dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Rencana strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan, atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi, sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mereview mana strategi yang berhasil dan tidak, dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan, apa

yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

121. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
122. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
123. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
124. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
125. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

126. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
127. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
128. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
129. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
1210. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
1211. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

- 12.12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12.13 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 12.14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12.15 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032);
- 12.16 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 12.17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

1218. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025);
1219. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
1220. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
1221. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
1222. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
1223. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
1224. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
1225. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024);
1226. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 188.44/0775/KUM/2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2021-2025 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang penyusunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja di Kota Banjarmasin yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait guna mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-

2026, yaitu: “BANJARMASIN BAIMAN DAN LEBIH BERMARTABAT”.

1.4 Tujuan

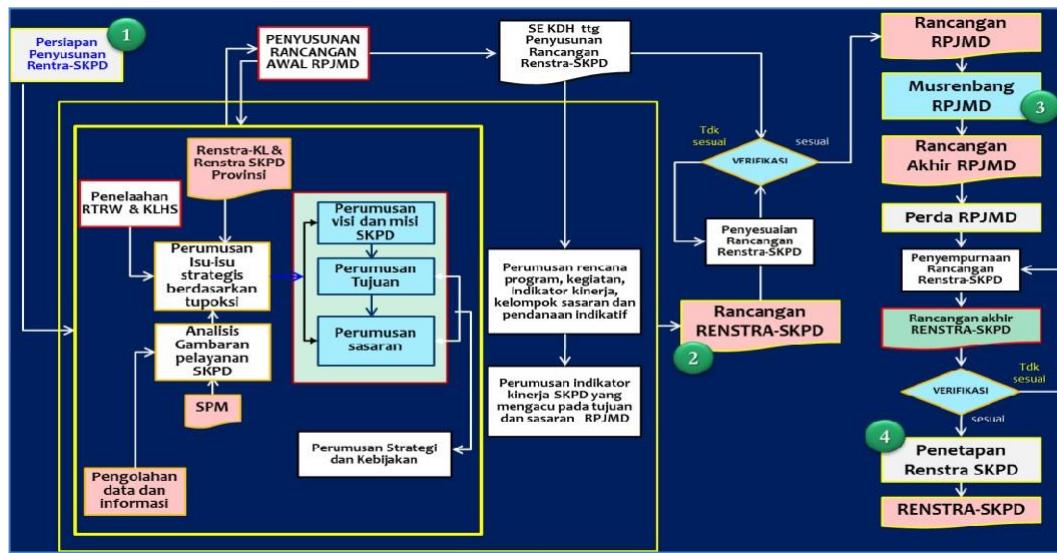
Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarmasin dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;
2. Sebagai landasan operasional resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Banjarmasin sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;

4. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien, serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin 2021-2026. Berdasarkan Permendagri tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu: persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra.

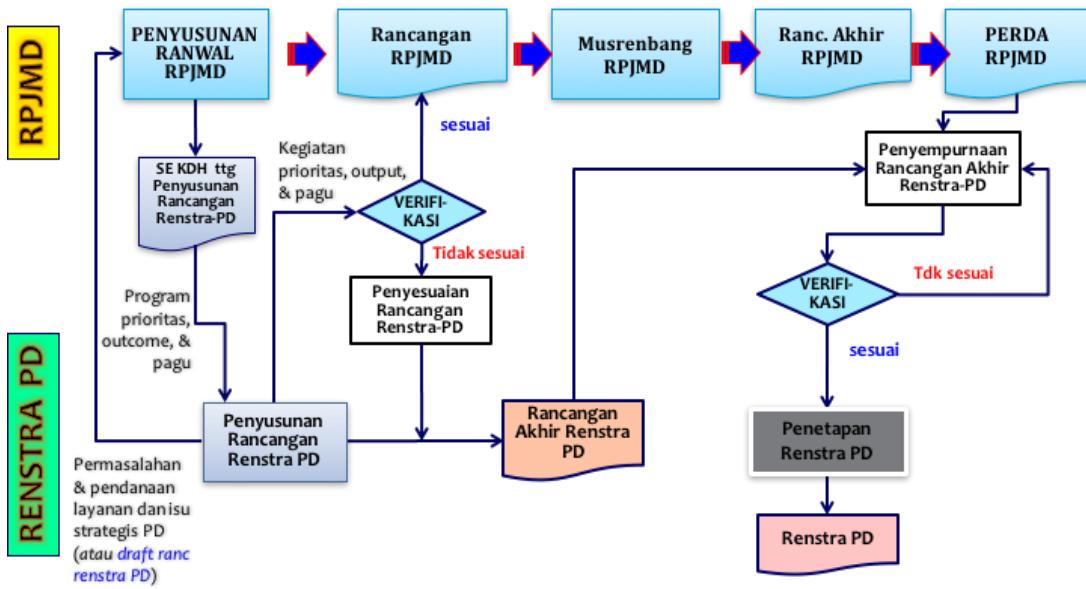
Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian penyusunan dokumen oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja selaku kepala perangkat daerah, dimana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin. Model Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 ditampilkan pada Gambar 1.1 berikut ini:



Sumber: Kemendagri, 2010

*Gambar 1.1
Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026.*

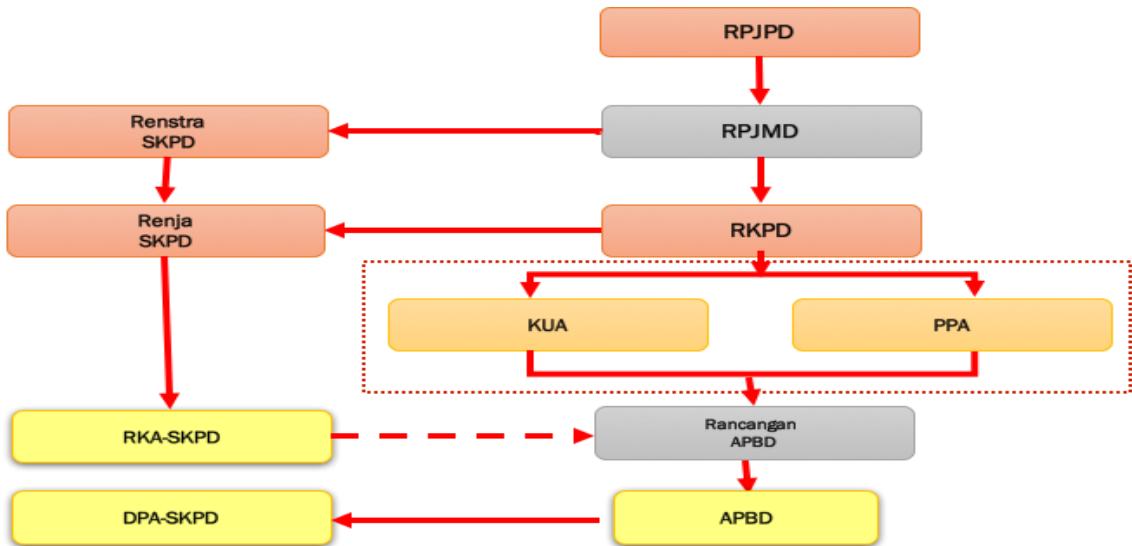
Dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih. Dokumen RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin. ditampilkan pada Gambar 1.2 berikut ini:



Sumber: Kemendagri, 2017

*Gambar 1.2
Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026
dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026*

Renstra perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Renja perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka dokumen Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Renstra bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra yang tergambar pada Gambar 1.3 berikut ini:



Sumber: Kemendagri, 2017

*Gambar 1.3
Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026*

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *Stakeholders* Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai proses disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, kemudian landasan hukum dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat isi dokumen rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Telaahan Visi, Misi, dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan SKPD disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja untuk periode tahun 2021-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pembinaan koperasi, usaha mikro, pembinaan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja serta pembinaan dan pelatihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan pasar sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro dan ketenagakerjaan;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan koperasi;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan usaha mikro;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, pembinaan, pelatihan dan penempatan kerja;

- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial; dan
- g. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan

- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Adapun tugas masing sub bagian adalah:

- a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan Dinas.
- b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat dan karsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.

2. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan koordinasi dalam dalam pemberian bimbingan,

melakukan pembinaan koperasi, penyelenggaraan pelatihan bagi koperasi dan bimbingan kelembagaan koprasir serta fasilitas permodalan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan koperasi;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis pendirian koperasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan koperasi;
- d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tentang manajemen usaha dan kewirausahaan bagi pengelola koperasi;
- e. Pelaksanaan bimbingan untuk memperoleh akses permodalan kepada koperasi;
- f. Pelaksanaan bimbingan permodalan di bidang perdagangan, aneka usaha, dan industri;
- g. Pelaksanaan proses rekomendasi permohonan pinjaman oleh koperasi, usaha mikro, dan usaha informal; dan
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tentang permodalan bagi pengelola koperasi dan usaha mikro. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh:
 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
 - Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan, kebijaksanaan dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan kelembagaan,

melakukan pembinaan kelembangan koperasi dan menyelenggarakan pelatihan bagi koperasi.

2. Seksi Pembinaan Usaha;

- Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan perencanaan dan program, pemberian bimbingan usaha koperasi, melaksanakan pelatihan dan promosi produk koperasi.

3. Seksi Fasilitasi Permodalan.

- Seksi Fasilitasi Permodalan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan pengolahan, melakukan bimbingan di bidang fasilitasi permodalan koperasi, dan pelaksanaan pelatihan bagi koperasi.

3. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan perencanaan dan program, pemberian bimbingan dan penyuluhan, bimbingan usaha dan menyelenggarakan pelatihan dan promosi produk usaha mikro.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. penyedia bahan dan melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- b. pengelolaan data program bimbingan teknis pembangunan usaha mikro;
- c. penyusunan bahan petunjuk teknis/pembinaan dan pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha mikro;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan administrasi umum dan manajemen usaha mikro;
- e. pelaksanaan analisa pembangunan usaha mikro; dan
- f. penyusunan bahan dan mengolah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta penyajian bahan promosi/pameran produksi usaha mikro.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bidang Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh:

- 1. Seksi Perizinan dan Kerjasama;
- 2. Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
- 3. Seksi Permodalan dan Pemasaran.
 - (1) Seksi Perizinan dan kerjasama mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan pelayanan perizinan dan kerjasama dalam pengembangan usaha mikro.
 - (2) Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan, menyelenggarakan pelatihan dan promosi produk usaha mikro.
 - (3) Seksi Permodalan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan pengolahan, melakukan bimbingan di bidang fasilitas permodalan dan pemasaran usaha mikro.

4. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan kebijakan, perencanaan dan program pelatihan dan pemagangan, perijinan, pemberian bimbingan dan penyuluhan jabatan, bimbingan usaha, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, informasi pasar kerja serta perluasan kesempatan kerja.

Untuk menyelenggaraan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program pelatihan, pemagangan, dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja;
- b. Pelaksanaan perizinan lembaga pelatihan kerja swasta, pembinaan lembaga pelatihan kerja dan pemagangan;
- c. Koordinasi dengan lembaga, organisasi dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program pelatihan, pemagangan dan produktivitas;
- d. Penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan jabatan, perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja lokal, antar daerah maupun luar negeri;
- e. Pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA), izin Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Pelayanan Penempatan swasta (LPPS);
- f. Pemberian layanan kepada TKI pra dan purna penempatan;
- g. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pengembangan kesempatan kerja; dan
- h. Pelaksanaan perencanaan tenaga kerja makro dan memonitoring perencanaan Tenaga Kerja Mikro Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh:

1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
3. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
 - (1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, pembinaan lembaga pelatihan kerja serta pemberdayaan lembaga pelayanan peningkatan produktivitas.
 - (2) Seksi penempatan tenaga kerja mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penempatan dan penyaluran tenaga kerja.
 - (3) Seksi informasi pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.

5. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, hubungan industrial, persyaratan kerja dan jaminan sosial serta penyelesaian perselisihan lembaga industrial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, perencanaan pengaturan, dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan dalam hal perselisihan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- b. Penyusunan, perencanaan, pengaturan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan dalam hal kelembagaan dan ketenagakerjaan;
- c. Penyusunan, perencanaan, pengaturan, dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan dalam hal jaminan sosial dan tenaga kerja; dan
- d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan hubungan industrial dan jaminan sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial terdiri dari:

1. Seksi perselisihan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
 2. Seksi kelembagaan dan ketenagakerjaan; dan
 3. Seksi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.
- (1) Seksi perselisihan hubungan industrial dan persyaratan kerja mempunyai tugas pengumpulan bahan, melakukan pembinaan persyaratan kerja, menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan/hubungan industrial.
- (2) Seksi kelembagaan dan ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan pendidikan hubungan industrial bagi pekerja dan pengusaha serta pembinaan terhadap organisasi pekerja dan pengusaha.

- (3) Seksi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan kordinasi hubungan industri mengenai nilai upah dan jaminan sosial tenaga kerja.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Unit Pelaksana Teknis

- (1) Pada Dinas memiliki Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25), Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

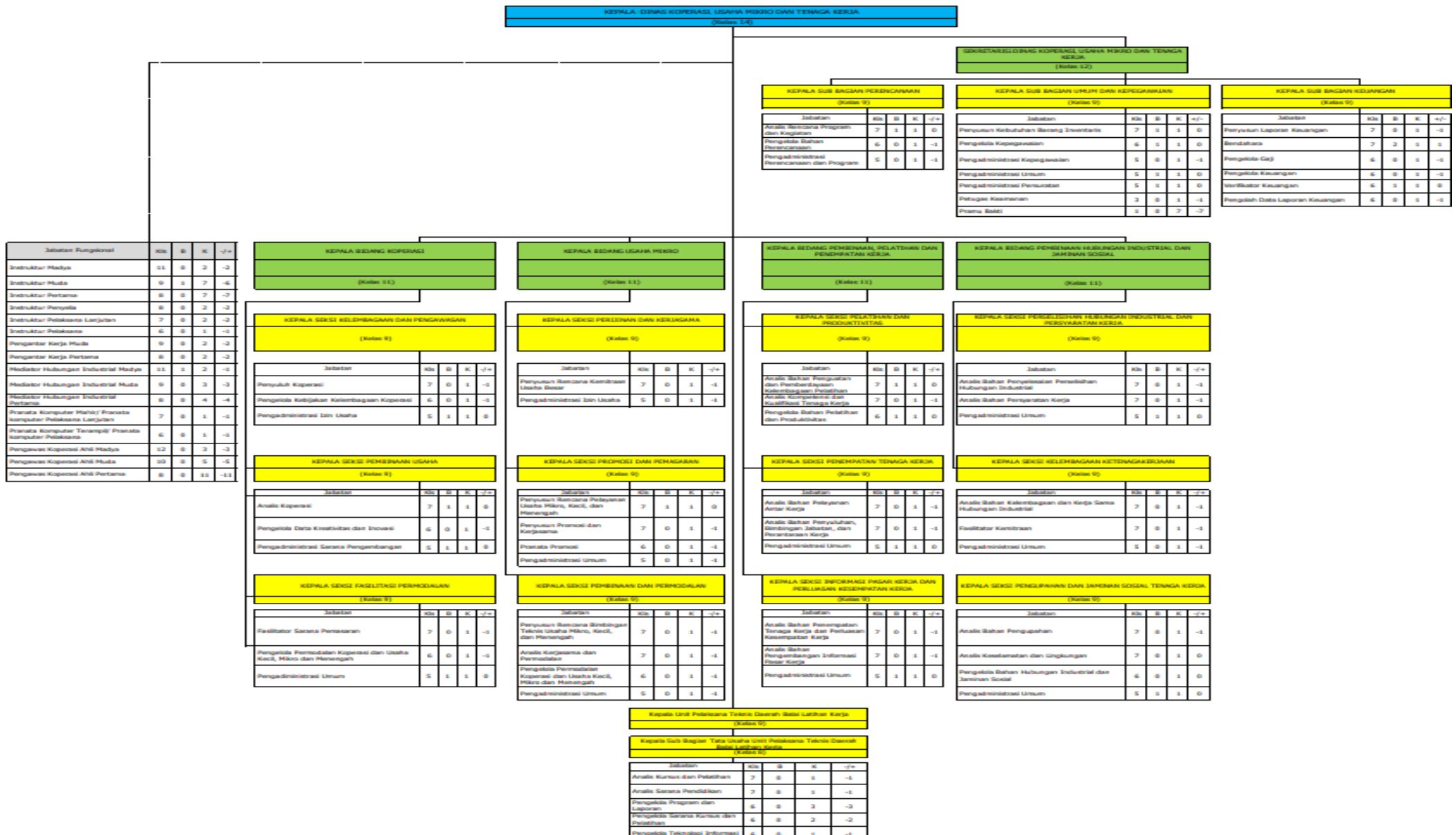
Adapun susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Koperasi
 - a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha; dan
 - c. Seksi Fasilitasi Permodalan.
8. Bidang Usaha Mikro
 - a. Seksi Perizinan dan Kerjasama;
 - b. Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
 - c. Seksi Permodalan dan Pemasaran.
9. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan

- c. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
10. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
- a. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Ketenagakerjaan; dan
 - c. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Secara lengkap struktur organisasi (Peta Jabatan) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang disajikan dalam gambar 2.1 berikut ini:

PETA JABATAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN



Gambar 2.1
Peta Jabatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja sebanyak 62 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja

No.	Pegawai	Jumlah (Orang)
1.	PNS	44
2.	Kontrak	18
Jumlah		62

a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 nomor 25) maka formasi jabatan struktural di Dinas Koperasi, Usaha Mikro

dan Tenaga kerja terdiri dari eselon II, III, dan IV, yaitu sebanyak 20 orang Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Yang Menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2021

No.	Jabatan / Staf	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	15
4.	Fungsional	6
5.	Staf	16
Jumlah		44

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan / pangkat

Data jumlah pegawai berdasarkan golongan / pangkat selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Berdasarkan Pangkat / Golongan Tahun 2021

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1.	IVc	-
2.	IVb	1
3.	Iva	11
4.	IIId	15
5.	IIIc	4
6.	IIIb	8
7.	IIIa	4
8.	IID	1

9.	IIc	-
10.	IIb	-
11.	IIa	-
12.	Id	-
13.	Ic	-
14.	Ib	-
15.	Ia	-
Jumlah		44

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Data jumlah pegawai berdasarkan pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata-2 (S-2)	9
2.	Strata-1 (S-1)	28
3.	Sarjana Muda (D-3)	1
4.	SLTA / SMK	6
5.	SLTP	-
6.	SD	-
Jumlah		44

2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga kerja Kota Banjarmasin tercantum dalam tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Sarana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
Kota Banjarmasin Tahun 2021

No.	Barang	Jumlah	Satuan	Keadaan Barang
1	Bangunan Kantor	4	Buah	Baik
2	Listrik	3	Jaringan	Baik
3	Air	3	Jaringan	Baik
4	Telepon/Fax/PABX	2	Jaringan	Baik
5	Ruang Rapat	1	Buah	Baik
6	Mushola	1	Buah	Baik
7	Mobil Dinas	7	Buah	Baik
8	Sepeda Motor	12	buah	Baik
9	Perkakas Bengkel	5	Buah	Baik
10	Timbangan	25	Buah	Baik
11	Mesin Absen	1	Buah	Baik
12	Lemari Besi	15	Buah	Baik
13	Dry Cabinet	27	Buah	Baik
14	Filling Cabinet (Besi)	17	Buah	Baik
15	Lemari Kaca	9	Buah	Baik
16	Lemari Kayu	2	Buah	Baik
17	Papan Pengumuman	1	Buah	Baik
18	Whiteboard	3	Buah	Baik
19	Rak Kayu	4	Buah	Baik
20	Kursi Rapat	72	Buah	Baik
21	Bangku Tunggu	1	Buah	Baik
22	Sofa	1	Set	Baik
23	Lemari Es	1	Buah	Rusak
24	AC	28	Buah	Baik
25	Televisi	2	Buah	Baik
26	Handycam	2	Buah	Baik
27	Komputer PC	20	Buah	Baik
28	Laptop/Notebook	24/1	Buah	Baik

29	Hardisk Eksternal	2	Buah	Baik
30	Printer	9	Buah	Baik
31	Modem/Router ADSL	1	Buah	Baik
32	Meja Kerja Pejabat	2	Buah	Baik
33	Eselon II	4	Buah	Baik
34	Meja Kerja Pejabat	21	Buah	Baik
35	Eselon III	1	Buah	Baik
36	Meja Kerja Pegawai Non Struktural Meja Rapat	3	Buah	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja memiliki kewenangan dalam pembinaan koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mencakup pembinaan kesejahteraan untuk usaha mikro dan koperasi. Sedangkan Tenaga Kerja mencakup pekerja, pengusaha dan Lembaga Pelatihan Swasta.

Yang menjadi kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

- Pelayanan Penciptaan Wirausaha Baru
- Pengembangan dan Penataan Usaha Mikro dan PKL
- Pengawasan kegiatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi
 - Penilaian pemberian sertifikasi kesehatan KSP dan USP koperasi
 - Pemberian izin usaha simpan pinjam koperasi
 - Penetapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro.

- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha baru, pengelola koperasi, dan usaha mikro.
- Fasilitasi pembiayaan atau permodalan bagi koperasi dan usaha mikro.
- Peraturan dan pelaksanaan konsultasi dan bimbingan terhadap koperasi UM.
- Pengaturan pengawasan dan pengendalian permodalan koperasi yang bersumber dari kredit Program pemerintah dan kredit lainnya.
- Penyediaan dukungan kerja sama antara instansi terkait dalam pembinaan koperasi UM.
- Memberikan perluasaan jaringan usaha bagi koperasi dan UM
- Penyelenggaraan koordinasi penyusunan program pengelolaan dana dan informasi di bidang perkoperasian dan UM.
- Fasilitasi kemitraan usaha koperasi dengan pihak ketiga
- Pembinaan kelembagaan terhadap koperasi dan UM.
- Pemberian rekomendasi kepada koperasi dan UM.
- Memfasilitasi izin IUMK.
- Pemberian persetujuan dan rekomendasi pengembangan usaha koperasi.
- Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM, Fasilitasi Permodalan, Promosi, Kemitraaan dan Jaringan Koperasi dan UM.
- Pelayanan pelatihan kerja
- Pelayanan penempatan tenaga kerja
- Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

- Pelayanan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan bagi buruh dan karyawan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri antara lain:

A. Bidang Koperasi

- Secara Organisasi

1. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar;
2. Koperasi belum memiliki visi untuk menjadi modern (sumber daya manusia, organisasi, usaha dan inovasi);
3. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi;
4. Masih banyaknya koperasi yang berorientasi atau bergantung pada bantuan pemerintah; dan
5. Masih banyak koperasi yang tidak aktif usaha.

- Secara Organisasi

1. Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi;
2. Kurangnya kapasitas koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan bagi anggota;

3. Kurangnya kemampuan koperasi untuk memenuhi target produksi (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas) sesuai permintaan pasar;
4. Terbatasnya kemampuan koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar, dan saluran pemasaran; dan
5. Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran antar koperasi dan antara koperasi dan usaha besar.

- Secara Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Banyak anggota yang tidak mengerti tentang koperasi;
2. Kurangnya keteladanan koperasi;
3. Mentalitas dan orientasi bisnis SDM koperasi masih rendah;
4. Rendahnya kapasitas SDM koperasi dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran; dan
5. Kurangnya jangkauan penyuluhan dan diklat perkoperasian.

B. Bidang Usaha Mikro

Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM.

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM saat ini berkaitan dengan:

1. Peningkatan formalisasi usaha dengan tata kelola usaha yang lebih baik;
2. Peningkatan produktivitas yang didukung tenaga kerja terampil dan penerapan teknologi;
3. Peningkatan kapasitas untuk membangun kemitraan dan bergabung dalam jaringan produksi dan pemasaran global;
4. Pemanfaatan peluang yang semakin terbuka dari penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perjanjian kerjasama ekonomi bilateral dan kawasan lainnya; dan

5. Perbaikan kebijakan dan peraturan yang responsif terhadap perbaikan kinerja dan daya saing UMKM.

Berbagai masalah dan tantangan khususnya bagi pelaku usaha mikro tersebut di atas mengarahkan upaya-upaya pemberdayaan UMKM ke depan perlu difokuskan pada penanganan dua isu strategis yaitu pertumbuhan usaha dan daya saing. Kedua isu digambarkan oleh kondisi sulitnya usaha mikro untuk tumbuh menjadi usaha dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dan trend penurunan kontribusi usaha mikro dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor.

Penanganan kedua isu tersebut juga membutuhkan pendekatan yang paripurna melalui pengintegrasian berbagai sumber daya dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Penerapan desentralisasi juga perlu menjadi pertimbangan dalam rangka meningkatkan efisiensi dukungan pengembangan Usaha Mikro di berbagai wilayah. Pengembangan Usaha Mikro juga perlu mengantisipasi dampak dari perkembangan indikator-indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, konsumsi masyarakat, perubahan nilai tukar rupiah, serta perubahan tingkat suku bunga acuan. Pada saat yang sama, Usaha Mikro juga perlu mencermati perkembangan perubahan pasar global terutama dengan perubahan pasar di tujuan ekspor dan perkembangan selera pasar global.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi koperasi untuk berkembang. Tantangan yang dihadapi dapat dimitigasi menjadi peluang bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan

Tenaga Kerja Kota Banjarmasin untuk memperbaiki dan menata untuk perbaikan Koperasi secara keseluruhan.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020 dapat terlihat dalam tabel 2.6 serta Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020 dapat dilihat 2.7 berikut ini:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaji dan Tunjangan	653.087.349.736	4.755.025.230	4.474.759.470	4.982.370.302	2.965.634.447	607.661.061.558	3.063.794.896	2.898.513.986	2.891.057.960	2.678.411.965	93,04%	64,45%	64,77%	58,03%	90,31%		
Tambahan Penghasilan PNS	102.139.400.000	1.496.400.000	1.585.800.000	4.017.300.000	3.051.312.923	95.804.079.090	1.259.358.917	1.354.179.175	3.047.434.595	2.611.088.094	93,17%	84,16%	85,39%	75,85%	85,57%		
BELANJA LANGSUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	351.050.000	485.000.000	460.000.000	513.840.000	231.476.762	339.406.248	437.763.418	448.591.158	466.292.466	215.325.464	-	90,26%	97,52%	-	93,02%	-	-
Rapat-rapat koordinasi , Monitoring, dan Evaluasi dalam daerah	-	193.650.000	135.000.000	-	-	-	139.710.000	115.220.000	-	-	-	72,15%	85,35%	-	-	-	-
Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran	426.703.000	505.183.000	480.000.000	560.523.000	571.200.700	426.703.000	418.764.750	398.538.650	404.364.743	533.271.544	-	82,89%	83,03%	-	93,36%	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	95.000.000	214.260.000	82.000.000	114.240.000	420.000.000	74.033.850	199.578.245	76.513.334	113.590.884	416.354.873	-	93,15%	93,31%	-	99,13%	-	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	153.592.000	-	-	-	-	143.973.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan prasarana kantor	-	83.985.000	154.830.000	224.597.500	117.190.000	-	76.485.000	154.037.500	210.865.500	113.327.700	-	91,07%	99,49%	-	96,70%	-	-
Pembangunan Gedung Bukak Kantor	-	1.839.800.000	2.583.200.000	3.944.020.000	3.954.883.000	-	1.668.283.000	2.216.559.682	100.300.000	3.210.244.040	-	90,68%	85,81%	-	81,17%	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu	-	23.800.000	21.000.000	19.950.000	14.950.000	-	19.250.000	17.275.000	15.316.000	14.575.000	-	80,88%	82,26%	-	97,49%	-	-
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	-			-	20.000.000	-			-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	-	25.000.000	26.800.000	12.800.000	18.000.000	-	25.000.000	16.036.750	12.800.000	18.000.000	-	100%	59,84%	-	100%	-	-
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	549.280.000	52.090.000	443.208.000	60.000.000	36.950.000	509.933.600	41.698.000	422.418.000	60.000.000	36.950.000	-	80,05%	95,31%	-	100%	-	-
Penciptaan dan Pengembangan Pusat Expo/UKM Center	429.750.000	350.000.000	140.000.000	139.855.000	-	425.810.000	339.389.000	139.130.000	-	-	-	96,97%	99,38%	-	-	-	-
Program Pengembangan Permodalan dan pembiayaan KUMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendampingan penyediaan permodalan dan pembiayaan KUMKM	-	-	-	19.000.000	-	-	-	-	17.400.000	-	-	-	-	91,58%	-	-	-
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD	45.655.000	-	-	-	-	45.055.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru	550.000.000	-		-	807.178.950	505.871.000	-	-	-	725.928.900	-	-	-	-	89,93%	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Selai Nanas	-	45.171.250	46.145.000	-	-	-	43.430.000	44.433.000	-	-	-	96,16%	96,29%	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Pembuatan Dodol Buah	-	107.571.250	-	-	-	-	103.135.000	-	-	-	-	95,88%	-	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Pembuatan Rampiye	-	66.171.250	-	-	-	-	22.445.000	-	-	-	-	33,92%	-	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Reparasi Laptop dan Printer	-	85.951.250	-	-	-	-	79.886.000	-	-	-	-	92,94%	-	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan	-	47.851.250	70.980.000	-	-	-	45.851.000	66.223.750	-	-	-	95,82%	93,30%	-	-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Reparasi Telepon Genggam																	
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Pembuatan Kue Kering	-	89.481.250	-	-	-	87.606.000	-	-	-	-	97,90%	-	-	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Potong Rambut	-	37.131.250	-	-	-	35.330.000	-	-	-	-	95,15%	-	-	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Pembuatan Tas Sasirangan	-	28.631.250	50.100.000	-	-	26.905.000	43.125.750	-	-	-	93,97%	86,08%	-	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Pembuatan Sepatu Sasirangan	-	50.151.250	-	-	-	48.400.000	-	-	-	-	96,51%	-	-	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Pembuatan Jus Buah	-	50.061.250	-	-	-	48.035.000	-	-	-	-	95,95%	-	-	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Pembuatan Souvenir Kerajinan	-	47.931.250	48.445.000	-	-	45.780.000	46.700.000	-	-	-	95,51%	96,40%	-	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Percetakan Sablon	-	117.151.250	-	-	-	114.505.000	-	-	-	-	97,74%	-	-	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Pembuatan Souvenir Boneka	-	47.931.250	69.130.000	-	-	46.230.000	68.830.000	-	-	-	96,45%	99,57%	-	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Pembuatan Tudung Saji/Hias	-	25.131.250	-	-	-	23.280.000	-	-	-	-	92,63%	-	-	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Pembuatan Rajut	-	45.851.250	51.425.000	-	-	43.976.000	30.738.000	-	-	-	95,91%	59,77%	-	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Pembuatan Dompet Manik	-	25.131.250	-	-	-	23.130.000	-	-	-	-	92,04%	-	-	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Pembuatan Manisan Buah	-	-	256.375.000	-	-	-	243.499.500	-	-	-	94,98%	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Kue Basah	-	-	84.275.000	-	-	-	-	62.366.000	-	-	-	-	74,00%	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Laundry Helm	-	-	37.445.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Pembuatan Bordir	-	-	76.720.000	267.060.000	-	-	-	72.622.500	196.408.700	-	-	-	94,66%	73,54%	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Menjahit	-	-	158.280.000	377.142.500	-	-	-	150.255.000	310.384.450	-	-	-	94,93%	82,30%	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Pelatihan Kaos Sasirangan	-	-	-	63.970.000	-	-	-	-	47.072.500	-	-	-	-	73,59%	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pelatihan Pembuatan Sepatu	-	-	50.680.000	-	-	-	-	49.955.000	-	-	-	-	98,57%	-	-	-	-
Penciptaan Wirausaha Baru Melalui Pelatihan Kerajinan Purun	-	-	-	249.520.000	-	-	-	-	235.532.000	-	-	-	-	94,39%	-	-	-
Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan WUB	61.260.000	-	-	99.295.000	-	47.660.000	-	98.950.000	-	-	-	-	-	99,65%	-	-	-
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penunjang Pasar Rakyat	330.065.000	-	-	-	-	289.459.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM, Promosi Kemitraan dan Jaringan KUMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Jaringan dan Kemitraan dan Jaringan Koperasi dan UMK	-	19.200.000	19.200.000	10.800.000	19.099.500	-	14.700.000	18.300.000	10.750.000	19.099.500	-	76,56%	95,31%	99,54%	100%	-	-
Promosi Produk Koperasi dan Usaha Kecil	-	179.040.000	340.000.000	376.040.000	249.725.000	-	177.201.500	333.822.500	363.470.000	249.725.000	-	98,97%	98,18%	96,66%	100%	-	-
Pengembangan dan Penataan UKM Center	-	105.460.000	109.830.000	125.500.000	420.465.000	-	99.840.000	107.860.000	125.500.000	353.378.025	-	94,67%	98,21%	100%	84,04%	-	-
Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMK	-	70.280.000	37.560.000	33.360.000	943.608.000	-	69.302.000	35.500.000	33.180.000	911.837.000	-	98,61%	94,52%	99,46%	96,63%	-	-
Program Pengembangan usaha,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Permodalan/Pembentukan KUMKM dan Legalisasi Usaha KUMKM																	
Pendampingan Penyediaan Permodalan dan Pembentukan Koperasi dan UMK	-	30.770.000	55.770.000		39.208.000	-	25.160.000	52.160.000		11.470.000	-	81,77%	93,53%		29,25%	-	-
Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Serta Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan KUMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemutahiran Data dan Informasi Keragaan Koperasi dan UMK	-	35.000.000	75.000.000	22.000.000	14.670.000	-	28.000.000	49.400.000	20.350.000	14.670.000	-	80,00%	65,87%	92,50%	100%	-	-
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	191.135.000	-	-	-	-	180.925.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program pengembangan dan penataan organisasi tatalaksana dan BH kop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyaluran Perkoperasian	-	46.575.000	67.000.000	36.540.000	895.786.000	-	45.240.000	66.805.000	36.735.000	692.823.000	-	97,13%	99,71%	97,80%	77,34	-	-
Penataan BH Koperasi dan Umkm	-	36.425.000	50.000.000	26.000.000	11.350.000	-	32.275.000	38.550.000	20.350.000	11.350.000	-	88,61%	77,10%	78,27%	100%	-	-
Penataan organisasi dan tatalaksana kop	-	44.000.000	50.000.000	396.800.000	7.736.750	-	43.750.000	38.500.000	384.481.720	7.736.750	-	76,56%	77,00%	96,90%	100%	-	-
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	-	524.030.000	503.800.000	472.680.000	709.550.000	-	462.399.250	425.920.000	368.150.000	695.171.462	-	88,24%	84,54%	77,89%	97,97%	-	-
Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan dan Produktivitas	-	147.665.000	90.000.000	84.240.000	23.535.000	-	126.117.000	86.360.000	84.165.000	23.535.000	-	85,41%	95,56%	90,91%	100%	-	-
Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna	-			138.360.000	109.470.000	-	-		136.150.000	109.470.000	-			98,40%	100%	-	-
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	-					-	-	-		-	-				-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja	-	251.850.000	235.000.000	263.840.000	25.000.000	-	243.235.000	233.150.000	263.140.000	25.000.000	-	96,56%	99,21%	99,73%	100%	-	-
Perluasan Kesempatan KerjaPerluasan Kesempatan Kerja	-	554.700.000	350.000.000	340.400.000	79.200.550	-	475.825.531	294.558.400	277.043.000	71.720.550	-	85,78%	84,16%	81,39%	90,56%	-	-
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	-					-					-					-	-
Peningkatan Pembinaan dan Pemberian Layanan bagi Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Ketenagakerjaan	-	416.075.000	390.000.000	327.140.000	335.844.000	-	407.825.531	389.400.000	281.277.932	288.574.000	-	97,98%	99,85%	85,98%	85,93%	-	-
Pengembangan Pengupahan Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	-	186.110.000	180.000.000	156.390.000	6.810.000	-	182.690.000	177.270.000	147.360.000	6.810.000	-	98,16%	98,48%	94,23%	94,23%	-	-
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	-	-	-	219.100.000	53.160.000	-	-	-	212.900.000	53.160.000	-			97,17%	100%	-	-

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Renstra Tahun 2013-2017					Realisasi Capaian Tahun 2013-2017					Rasio Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Percentase Penyerapan Tenaga Kerja	-	-	-	21,44%	22%	23,15%	-	-	21,12%	36,10%	16,16%	-	-	98,50%	98,50%	69,80%
2.	Percentase Wirausaha Baru yang mandiri	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	82,76%	100%	100%	-	-	82,76%	100%	100%
3.	Percentase Koperasi Berkualitas	-	60,81%	61,58%	3,38%	4,50%	5%	-	-	3,34%	6,15%	-	-	-	98,81%	153,75%	-
4.	Percentase Usaha Mikro yang meningkat omzetnya	-	85%	87%	4,67%	5%	5,05%	-	-	4,08%	5,62%	9,06%	-	-	87,36%	124,8%	181,02%
5.	Percentase terselesaikannya	-	100%	100%	96,71%	96,75%	97,25%	-	-	100%	100%	100%	-	-	103,40%	100%	103,09%

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antara lain:

- a. Masih banyak koperasi yang belum tertata dan berbadan hukum;
- b. Masih ada koperasi yang kurang pengetahuan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi;
- c. Kebutuhan akan pengembangan kewirausahaan dan produk usaha mikro yang kompetitif;
- d. Penyelenggara masih tergantung dengan pihak ketiga dan tidak adanya fungsional pegawai pengantar kerja;
- e. Masih belum sesuai kompetensi kerja dengan kebutuhan dunia industri;
- f. Belum maksimalnya pemahaman peraturan perundang-undang ketenagakerjaan oleh pekerja, pengusaha dan lembaga ketenagakerjaan;
- g. pemahaman computerized based wirausahawan yang lemah sehingga memasuki dunia bisnis online yang digitalisasi belum maksimal;
- h. kondisi pandemi yang membatasi setiap gerak usaha dan kinerja pegawai dinas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan diatas antara lain :

- a. Kurangnya pengembangan dan penataan organisasi, tatalaksana dan badan hukum koperasi;

- b. Kurangnya pengawasan dan pengendalian monitoring dan evaluasi serta tidak terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi;
- c. Kurangnya pembinaan dan pembimbingan kewirausahaan (para pelaku usaha mikro dan para wirausaha baru);
- d. Kurangnya sarana dan prasarana, tidak adanya instruktur/ pelatihan yang belum ada, tidak adanya rekrutmen pegawai fungsional pengantar kerja;
- e. Kurangnya pembinaan dan penyiapan pencari kerja sesuai dengan kemajuan industri;
- f. Kurangnya pegawai teknis Hubungan Industrial dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada;
- g. Kurangnya pemahaman pengusaha terhadap pengupahan dan kesejahteraan pekerja.
- h. Kondisi pandemi yang menyulitkan pegawai pada saat turun lapangan maupun dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Pemetaan permasalahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terinci dalam Tabel T-B35 berikut ini:

Tabel T-B35
Pemetaan Permasalahan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja
Kota Banjarmasin

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kurang Tersedianya Lapangan Kerja yang terbuka	Masih banyak koperasi yang belum tertata dan berbadan hukum	Kurangnya Pengembangan dan Penataan Organisasi, Tatalaksana dan Badan Hukum Koperasi
		Masih ada Koperasi yang kurang pengetahuan dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Koperasi	Kurangnya pengawasan dan pengendalian Monitoring dan Evaluasi serta tidak terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Koperasi
		Kebutuhan akan pengembangan kewirausahaan dan produk Usaha Mikro yang Kompetitif	Kurangnya pembinaan dan pembimbingan ke wirausaha (para pelaku usaha mikro dan para wirausaha baru)

		Masih Penyelenggara tergantung dengan pihak ketiga dan Tidak adanya Fungsional Pegawai Pengantar Kerja	Kurangnya Sarana dan Prasarana,Tidak adanya instruktur/ pelatihan yang belum ada, Tidak adanya rekrutment Pegawai Fungsional Pengantar Kerja
		Masih Belum sesuai kompetensi kerja dengan kebutuhan dunia industri	Kurangnya pembinaan dan penyiapan pencari kerja sesuai dengan kemajuan industri
		Belum maksimalnya pemahaman peraturan perundang-undang ketenagakerjaan oleh pekerja, pengusaha dan Lembaga Ketenagakerjaan dan Belum semua perusahaan menerapkan struktur skala upah	Kurangnya Pegawai teknis Hubungan Industrial dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada dan Kurangnya pemahaman pengusaha terhadap pengupahan dan kesejahteraan pekerja

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Kota Banjarmasin 2021 – 2026 adalah **”Banjarmasin Baiman dan Lebih Bermartabat”**

Untuk mewujudkan visi Kota Banjarmasin 2021 – 2026 tersebut maka dijabarkan dalam 6 Misi yang menjadi pedoman pembangunan Kota Banjarmasin.

Dari enam misi tersebut, misi yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja adalah misi kesatu yaitu Misi **”Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan”**.

Dalam usaha mewujudkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tersebut tentunya ada faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi capaian visi misi tersebut. Faktor tersebut bisa berasal dari luar (eksternal) maupun dalam (internal).

a. Faktor Internal

- Kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas;

- Lemahnya perencanaan dan koordinasi;
- Lemahnya dalam pengelolaan manajemen usaha;
- Kurangnya pengetahuan bisnis para pengelola koperasi dan pelaku usaha mikro;
- Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi serta kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi;
- Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam bidang usaha yang dilakukan;
- Pengelola koperasi dan pelaku usaha mikro kurang inovatif;
- Kurangnya penguasaan teknologi;
- Kurang dalam pengalaman usaha
- Masih kurang dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan/permodalan.

b. Faktor Eksternal

- Mental masyarakat yang cenderung ingin mendapatkan penghasilan dengan cara yang mudah;
- Belum Optimalnya Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemanfaatan UPTD BLK.
- Kejuruan yang ada pada LPKS masih terbatas;
- Peraturan perundungan ketenagakerjaan yang tidak disertai dengan sanksi yang tegas;
- Respon manajemen terhadap kerjasama dengan pemerintah masih rendah.

- Kondisi pandemi COVID-19.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Dalam pelaksanaan Renstra, ada faktor penghambat ataupun faktor pendorong baik dari internal maupun eksternal dalam pelaksanaan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Ketenaga Kerjaan yaitu:

a. Faktor Penghambat

1. Rata-rata pendidikan masyarakat rendah;
2. Budaya malas tapi ingin hidup enak;
3. Etos kerja dan produktivitas kerja masih rendah;
4. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi serta kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi;
5. Lemahnya pemahaman *computer based* guna usaha online;
6. Terbatasnya pembayaran dan penyediaan teknologi secara nasional bagi koperasi;
7. Masih kurangnya kepercayaan untuk saling bekerjasama dengan pelaku ekonomi lain dan antar koperasi;
8. Persaingan usaha yang semakin ketat;
9. Pandemi COVID-19;
10. Kurangnya modal usaha bagi Usaha Mikro Kecil untuk lebih berkembang.

b. Faktor Pendukung

1. Struktur organisasi yang sesuai dengan eksistensi koperasi;

2. SDM Aparatur Pembina Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja yang cukup memadai
3. Adanya Peraturan Daerah tentang pemberdayaan usaha mikro;
4. Adanya dukungan kebijakan penumbuhan iklim berusaha yang kondusif dari pemerintah;
5. Potensi daerah yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan koperasi dan usaha mikro;
6. Adanya fasilitas permodalan dari lembaga/instansi terkait kepada usaha/mikro;
7. Banyaknya jumlah koperasi dan usaha mikro;
8. Jumlah LPKS cukup banyak;
9. Peran Lembaga Tripartit cukup bagus; dan
10. Peran LPTKIS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) cukup baik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

a. Faktor Penghambat

1. Belum tertata dengan baik penataan kawasan di dalam menyikapi perubahan struktur perekonomian dan pertumbuhan penduduk; dan
2. Pertambahan penduduk ekonomi global berdampak pada serapan tenaga kerja munculnya potensi konflik antara perusahaan dan pekerjanya.

b. Faktor Pendorong

1. Adanya payung hukum atau peraturan perundang-undangan;

2. Adanya dukungan dari pihak ketiga melalui program CSR (*Community Social Responsibility*); dan
3. Ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Adapun isu strategis sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin ialah:

1. Pembangunan sumber daya koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja;
2. Membangun ekonomi kerakyataan melalui koperasi usaha mikro;
3. Membangun daya saing usaha mikro;
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha mikro kecil melalui penciptaan wirausaha baru;
5. Menjadikan koperasi salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah;
6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan anggaran yang mencukupi akan mendukung pencapaian kesejahteraan koperasi, usaha mikro dan pembangunan tenaga kerja yang mampu berkarya;
7. Tersedianya tugas pokok dan fungsi yang jelas dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan memperlancar pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan yang secara bertahap akan mengurangi jumlah pengganguran;
8. Adanya komitmen dari pemerintah daerah dan dukungan pihak ketiga (sektor swasta) akan mendukung pencapaian kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sumber daya tenaga kerja yang berkualitas; dan
9. Tersedianya anggaran yang mencukupi akan membantu penyelenggaraan di bidang koperasi, usaha mikro dan ketenagakerjaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Koperas, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

TUJUAN

- a. Meningkatnya Peran Usaha Mikro dan Koperasi dalam Perekonomian.
- b. Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja.
- c. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

SASARAN

- a. Meningkatnya Wirausaha Baru yang Mandiri
- b. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi
- c. Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
- d. Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan}
- e. Meningkatnya Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel T-C25 sebagaimana terlampir berikut ini:

Tabel T-C25
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Peran Usaha Mikro dan Koperasi dalam Perekonomian		Persentase Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
		Meningkatnya Wirausaha Baru yang Mandiri	Persentase Wirausaha Baru yang Mandiri	20	3	3,5	4	4,5	5
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang berkualitas	15	4	4,5	5	5,5	6
2	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)		22	22,4	22,8	23,2	23,8
		Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	500	515	530	556	583	612
		Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan		5	7	9	11	13
3	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan		Hasil Evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: (1) Perencanaan, (2) Kinerja, (3) Pengukuran Kinerja, (4) Pelaporan Kinerja, (5) Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.		78 (BB)	78,5 (BB)	79 (BB)	79,5 (BB)	80 (A)
		Meningkatnya Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas koperasi, Usaha Mikro dan tenaga kerja		1,06	0,64	0,64	0,64	0,64

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Strategi yang akan diterapkan dapat dianalisa Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja ialah sebagai berikut:

- Bidang Koperasi
 1. Meningkatkan peran serta koperasi
- Bidang Usaha Mikro
 1. Menghimpun dan memberikan pengetahuan para pelaku usaha mikro
 2. Menumbuhkembangkan jiwa dan mental kewirausahaan
- Bidang Tenaga Kerja
 1. Memberikan keahlian pencari kerja untuk memasuki dunia kerja dari sektor formal dan informal
 2. Menempatkan tenaga kerja melalui Bursa Kerja
- Bidang Hubungan Industrial Pekerja dan Tenaga Kerja
 1. Memberikan pelayanan, pembinaan kepada Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Ketenagakerjaan

5.2 KEBIJAKAN

Kebijakan umum yang ditempuh dalam rangkaian pelaksanaan pencapaian tujuan oleh masing-masing bidang antara lain:

- Bidang Koperasi
 1. Mengadakan sosialisasi/bimbingan teknis kelembangan koperasi
- Bidang Usaha Mikro
 1. Mengadakan kegiatan pembimbingan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pelaku usaha mikro
 2. Mengadakan kegiatan pembimbingan dan pembinaan para wirausaha baru
 3. Mengadakam Inkubator Bisnis yaitu proses pengembangan usaha/ide bisnis yang dirancang untuk membantu, memandu, mengembangkan, serta menyiapkan suatu usaha dari pengembangan ide hingga lahirnya usaha yang dapat berdiri sendiri melalui program dukungan bisnis yang komprehensif. Tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja masyarakat, menciptakan iklim kewirausahaan dan ekosistem usaha yang kondusif, membangun atau mempercepat pertumbuhan industri lokal dan mendiversifikasi ekonomi lokal.
 4. BAHUMA (Bausaha Tanpa Bunga) merupakan fasilitasi pinjaman modal jangka pendek yang diberikan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana APBD dan/atau sumber lainnya yang sah tanpa agunan dan/atau agunan ringan dengan bunga 0% (nol persen) dalam

rangka pengembangan usaha ekonomi produktif dan kerakyatan yang dikembalikan dalam kurun waktu tertentu. Program BAHUMA akan dilaksanakan, setelah tahap pengkajian regulasi selesai.

5. Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender dan Pemahaman bahwasanya laki-laki harus mempunyai pekerjaan tetapuntuk memberi nafkah keluarga merupakan faktor kesenjangan Gender, melalui kegiatan penciptaan wirausaha baru Dinas koperasi Usaha Mikro dan Tenga Kerja Kota Banjarmasin dengan melaksanakan pelatihan pelatihan dengan tujuan masyarakat untuk berwirausaha (baik perempuan dan laki-laki), untuk memperoleh jenis pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Melalui Identifikasi Kebutuhan Pelatihan(Training Need Analysis) Identifikasi dilakukan dalam lingkup sasaranyang lebih luas (per Kecamatan) bekerja sama dengan Pemerintah Kota. Penyusunan Program Pelatihan penciptaan wirausaha baru yg responsif gender. Program Pelatihan tersebut adalah program pelatihan yang inovatif dan memiliki peluang usaha diverifikasi sesuai dengan kebutuhan peminat. Pemasaran Program Pelatihan, Rekruitmen dan Monitoring Lulusan Pelatihan. Program pelatihan penciptaanwirausaha baru yang responsive gender dilakukan secara intensif dengan penentuan waktu pelatihan di papan pengumuman yang dipajang, penyiapan brosur untuk setiap program pelatihan unggulan yang telah disusun, pemasaran di area sasaran yang tepat dan bekerja

sama dengan instansi terkait, serta pemasaran via whatshap dan sosial media lainnya yang akan memudahkan masyarakat mengetahui informasi tentang pelatihan tersebut. Pelaksanaan Pelatihan kegiatan penciptaan wirausaha baru yg pro perempuan sesuai perencanaan.

- Bidang Tenaga Kerja

1. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pelatihan dengan mengoptimalkan pemanfaatan BLK, mengadakan pelatihan dan pemagangan pencari tenaga kerja, melakukan Uji Kompetensi Pencari Kerja dan Tenaga Kerja, melakukan penempatan secara langsung maupun melalui Job Fair.

- Bidang Hubungan Industrial Pekerja dan Tenaga Kerja

1. Melakukan Sosialisasi, Bimtek, penyuluhan monitoring kepada Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Ketenagakerjaan.
2. Dalam mendukung misi 1 (satu) untuk Mewujudkan Kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, dengan Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam tujuan meningkatkan perekonomian dengan kaitannya mewujudkan Kota Cerdas (*SMART CITY*) untuk mengoptimalkan potensi daya saing ,mengampu indicator Persentase Angkatan Kerja yang bekerja di sector Pendidikan, Penelitian dan

pengembangan dan Persentase Tenaga Kerja yang bekerja di sector Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dapat dilihat pada Tabel T-C26 sebagaimana terlampir berikut ini:

Tabel T-C26
Tujuan, sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	Banjarmasin BAIMAN dan Lebih Bermartabat		
MISI 1	Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Peran Usaha Mikro dan Koperasi dalam Perekonomian	Meningkatnya Wirausaha Baru yang Mandiri	Menumbuhkembangkan jiwa dan mental kewirausahaan	Mengadakan kegiatan pembimbingan dan pembinaan para wirausaha baru
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatkan peran serta koperasi	Mengadakan sosialisasi/bimtek kelembagaan koperasi
Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Memberikan keahlian pencari kerja untuk memasuki dunia kerja dari sektor formal dan informal, Menempatkan tenaga kerja melalui Bursa Kerja dan Fasilitasi penempatan dan penyediaan informasi pasar kerja	Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pelatihan dengan dibangunnya BLK, Mengadakan pelatihan dan pemangangan pencari tenaga kerja, Melakukan Uji Kompetensi Pencari Kerja dan Tenaga Kerja, Melakukan Penempatan secara langsung dan Melalui Job Fair
	Meningkatnya Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Memberikan pelayanan, pembinaan kepada Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Ketenagakerjaan	Melakukan Sosialisasi, Bimtek, penyuluhan monitoring kepada Pekerja, Pengusaha dan Lembaga Ketenagakerjaan

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Penguatan komitmen mulai pimpinan perangkat daerah beserta seluruh ASN untuk mulai ikut terlibat aktif di dalam perencanaan kinerja	menerapkan anggaran berbasis kinerja dan melakukan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal terhadap capaian kinerja perangkat daerah secara berkala
--	---	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja memiliki beberapa program kerja dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

6.1. Program

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja.
- c. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- d. Program Penempatan Tenaga Kerja.
- e. Program Hubungan Industrial.
- f. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
- g. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
- h. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
- i. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).
- j. Program Pengembangan UMKM.

6.2. Kegiatan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- ❖ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tahun 2021

Pagu Rp. 6.029.000

Output Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renstra dan Renja
Tersusunnya Dokumen PK, PK Perubahan, IKU RKT,
dan RKT Perubahan.

Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja dan Renja
Perubahan.

Outcome Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2022

Pagu Rp. 6.029.000

Output Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, Renja
Perubahan, PK Perubahan, IKU, RKT dan RKT
Perubahan yg tersusun.

Outcome Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2023

Pagu Rp. 6.631.790

Output Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen Renstra, Renja,
Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, RKT dan RKT
Perubahan) yang tersusun sesuai dengan ketentuan.

Outcome Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 6.029.000
Output	Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, RKT dan RKT Perubahan) yang tersusun sesuai dengan ketentuan
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 6.029.000
Output	Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, RKT dan RKT Perubahan) yang tersusun sesuai dengan ketentuan
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 6.029.000
Output	Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan, RKT dan RKT Perubahan) yang tersusun sesuai dengan ketentuan
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

❖ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Tahun 2022

Pagu	Rp. 2.000.000
Output	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD yang tersusun.
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 2.200.000
Output	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun sesuai ketentuan.
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 2.200.000
Output	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun sesuai ketentuan
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 2.200.000
Output	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun sesuai ketentuan
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 2.200.000
Output	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun sesuai ketentuan
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

❖ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Tahun 2022

Pagu	Rp. 2.000.000
Output	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun.

Outcome Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2023

Pagu Rp. 2.200.000

Output Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun sesuai ketentuan.

Outcome Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2024

Pagu Rp. 2.200.000

Output Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun sesuai ketentuan.

Outcome Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2025

Pagu Rp. 2.200.000

Output Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun.

Outcome Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2026

Pagu Rp. 2.200.000

Output Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun.

Outcome Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- ❖ Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tahun 2022

Pagu	Rp. 2.000.000
Output	Tersedianya Dokumen LPPD, LKPJ dan IKK.
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 2.200.000
Output	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ yang tersusun sesuai ketentuan.
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 2.200.000
Output	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ yang tersusun sesuai ketentuan.
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 2.200.000
Output	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ yang tersusun sesuai ketentuan.
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah..

Tahun 2026

Pagu	Rp. 2.200.000
Output	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ yang tersusun sesuai ketentuan.
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

❖ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tahun 2021

Pagu	Rp. 11.971.000
Output	Tersusunnya Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Kinerja, Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK), LPPD, LKPJ, dan IKK.
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 11.471.000
Output	Laporan Evaluasi Renstra Renja dan RFK.
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 12.617.880
Output	Jumlah Laporan Evaluasi Renstra, Renja dan RFK yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 11.971.000
Output	Jumlah Laporan Evaluasi Renstra, Renja dan RFK yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 11.971.000
------	----------------

Output	jumlah Laporan Evaluasi Renstra, Renja dan RFK yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 11.971.000
Output	jumlah Laporan Evaluasi Renstra, Renja dan RFK yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tahun 2021

Pagu	Rp. 7.831.376.781
Output	Persentase Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan. Persentase Terbayarkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.
Outcome	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 8.366.419.663
Output	Jumlah ASN yang di bayar gaji dan tunjangan.
Outcome	Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 8.700.000.000
Output	Jumlah ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan Percentase Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan tepat waktu Percentase Pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS uang yang ditanggung SKPD Percentase Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS dan Jaminan Kematian PNS yang ditanggung SKPD
Outcome	Percentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 8.700.000.000
Output	Jumlah ASN yang di bayar gaji dan tunjangan
Outcome	Percentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 8.700.000.000
Output	Jumlah ASN yang di bayar gaji dan tunjangan
Outcome	Percentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2026

Pagu	Rp. Rp. 8.700.000.000
Output	Jumlah ASN yang di bayar gaji dan tunjangan
Outcome	Percentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

- ❖ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Tahun 2021

Pagu	Rp. 5.750.000
Output	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Keuangan.
Outcome	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 5.750.000
Output	Terfasilitasinya Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan.
Outcome	Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 5.750.000
Output	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan.
Outcome	Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 5.750.000
Output	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan

Outcome Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2025

Pagu Rp. 5.750.000

Output Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan

Outcome Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2026

Pagu Rp. 5.750.000

Output Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan

Outcome Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

- ❖ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tahun 2022

Pagu Rp. 1.540.000

Output Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu.

Outcome Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2023

Pagu Rp. 1.540.000

Output	Persentase laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun sesuai dengan SAP dan tepat waktu
Outcome	Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 1.540.000
Output	Persentase laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun sesuai dengan SAP dan tepat waktu
Outcome	Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 1.540.000
Output	Persentase laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun sesuai dengan SAP dan tepat waktu
Outcome	Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 1.540.000
Output	Persentase laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun sesuai dengan SAP dan tepat waktu
Outcome	Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

- ❖ Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Tahun 2022

Pagu Rp. 1.000.000

Output Tanggapan Pemeriksaan.

Outcome Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2023

Pagu Rp. 1.000.000

Output Persentase Tanggapan pemeriksaan yang diselesaikan tepat waktu

Outcome Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2024

Pagu Rp. 1.000.000

Output Persentase Tanggapan pemeriksaan yang diselesaikan tepat waktu

Outcome Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2025

Pagu Rp. 1.000.000

Output Persentase Tanggapan pemeriksaan yang diselesaikan tepat waktu

Outcome Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2026

Pagu Rp. 1.000.000

Output	Persentase Tanggapan pemeriksaan yang diselesaikan tepat waktu
Outcome	Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

❖ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Tahun 2022

Pagu	Rp. 13.275.000
Output	Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu.
Outcome	Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 13.275.000
Output	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu
Outcome	Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 13.275.000
Output	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu
Outcome	Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 13.275.000
Output	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanian/Semesteran SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu
Outcome	Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 13.275.000
Output	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanian/Semesteran SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu
Outcome	Persentase Administrasi Keuangan SKPD yang terlaksana.

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- ❖ Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Tahun 2022

Pagu	Rp. 3.000.000
Output	Tersedianya dokumen RKBMD, RKBMD Perubahan, RKPBM, RKPBM Perubahan.
Outcome	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana

Tahun 2023

Pagu	Rp. 3.300.000
Output	Jumlah dokumen Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun sesuai.

Outcome	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana
Tahun 2024	
Pagu	Rp. 3.300.000
Output	Jumlah dokumen Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun sesuai.
Outcome	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana
Tahun 2025	
Pagu	Rp. 3.300.000
Output	Jumlah dokumen Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun sesuai
Outcome	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana
Tahun 2026	
Pagu	Rp. 3.300.000
Output	Jumlah dokumen Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun sesuai.
Outcome	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- ❖ Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Tahun 2021	
Pagu	Rp. 26.700.000

Output Jumlah Pakaian Sasirangan
Outcome Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Tahun 2022

Pagu Rp. 36.000.000
Output Jumlah pakaian sasirangan yang di beli
 Jumlah Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi
Outcome Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang terlaksana.

Tahun 2023

Pagu Rp. 10.000.000
Output Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari tertentu
 Jumlah Pengadaan pakaian sasirangan
Outcome Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang terlaksana.

Tahun 2024

Pagu Rp. 36.000.000
Output Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari tertentu
 Jumlah Pengadaan pakaian sasirangan
Outcome Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang terlaksana.

Tahun 2025

Pagu Rp. 10.000.000
Output Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari tertentu
 Jumlah Pengadaan pakaian sasirangan

Outcome Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang terlaksana.

Tahun 2026

Pagu Rp. 36.000.000

Output Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari tertentu
 Jumlah Pengadaan pakaian sasirangan

Outcome Persentase administrasi kepegawaian SKPD yang terlaksana.

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tahun 2021

Pagu Rp. 4.000.000

Output persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Outcome Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Tahun 2022

Pagu Rp. 20.000.000

Output Pengadaan komponen instalasi listrik.

Outcome Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2023

Pagu Rp. 7.212.590

Output	Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia sesuai Rencana belanja.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 7.212.590
Output	Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia sesuai Rencana belanja.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 7.212.590
Output	Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia sesuai Rencana belanja.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 7.212.590
Output	Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia sesuai Rencana belanja.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tahun 2022

Pagu	Rp. 10.000.000
Output	Pengadaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2023	
Pagu	Rp. 11.385.330
Output	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai Rencana belanja.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.
Tahun 2024	
Pagu	Rp. 11.385.330
Output	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai Rencana belanja.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.
Tahun 2025	
Pagu	Rp. 11.385.330
Output	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai Rencana belanja.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.
Tahun 2026	
Pagu	Rp. 11.385.330
Output	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai Rencana belanja.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tahun 2021	
Pagu	Rp. 40.870.000
Output	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Outcome	Administrasi umum Perangkat Daerah.
Tahun 2022	
Pagu	Rp. 140.870.000
Output	Pengadaan penyediaan peralatan rumah tangga.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.
Tahun 2023	
Pagu	Rp. 81.004.770
Output	Persentase tersedianya peralatan rumah tangga sesuai rencana belanja.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.
Tahun 2024	
Pagu	Rp. 81.004.770
Output	Persentase tersedianya peralatan rumah tangga sesuai rencana belanja.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.
Tahun 2025	
Pagu	Rp. 81.004.770
Output	Persentase tersedianya peralatan rumah tangga sesuai rencana belanja.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.
Tahun 2026	
Pagu	Rp. 81.004.770
Output	Persentase tersedianya peralatan rumah tangga sesuai rencana belanja.

Outcome Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tahun 2021

Pagu Rp. 173.841.000

Output Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Outcome Administrasi umum Perangkat Daerah.

Tahun 2022

Pagu Rp. 199.841.000

Output Amplop Putih No..110, Lakban, Isi Staples No.10, Ordner Folio, Map Snellhecter, Map plastik Pakai Jepit, Double Folio 100, Buku Agenda Surat Keluar/Masuk, Cutter L-500, Binder Clip 155 Width 32 mm, Binder Clip 260 Width 51 mm, Trigonal Clip No..3, Gunting Kertas Ukuran Sedang, Isolasi Kecil, Kertas Fax, Kertas HVS A4 70 Gram, Lem Cair, Lem Stik 21 gram, Map Batik Ukuran Folio, Motif Batik, 650 gram, Penggaris Besi, Pensil, Penghapus Papan Tulis, Penghapus Pulpen, Pita Fax, Pulpen Biasa, Balliner, Spidol White Board, Spidol Permanen, Stabilo, Staples No.10, Stempel Dinas, Bak Stempel, Post-it 653 (Size 34,9 x 47,66 mm), Post-it 653 (Size 47,6 x 73 mm), Tempat Isolasi, Amplop Putih No..90, Kertas HVS F4 / Folio 70 Gram, Map Biasa, Pelubang Kertas.

Outcome Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2023

Pagu Rp. 123.013.220

Output	Persentase tersedianya bahan logistik kantor sesuai rencana belanja.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 135.314.544
Output	Persentase tersedianya bahan logistik kantor sesuai rencana belanja
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 148.845.997
Output	Persentase tersedianya bahan logistik kantor sesuai rencana belanja
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana

Tahun 2026

Pagu	Rp. 163.730.597
Output	Persentase tersedianya bahan logistik kantor sesuai rencana belanja.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tahun 2021

Pagu	Rp. 13.280.000
Output	Jumlah cetakan.
Outcome	Jumlah Penggandaan.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 15.000.000
Output	Amplop SKPD. Map SKPD. Blanko Disposisi. Spanduk.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 15.000.000
Output	Jumlah cetak yang dilaksanakan Jumlah Penggandaan yang dilaksanakan
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 15.000.000
Output	Jumlah cetak yang dilaksanakan Jumlah Penggandaan yang dilaksanakan
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 15.000.000
Output	Jumlah cetak yang dilaksanakan Jumlah Penggandaan yang dilaksanakan
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 15.000.000
Output	Jumlah cetak yang dilaksanakan

Jumlah Penggandaan yang dilaksanakan
Outcome Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

- ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tahun 2021

Pagu Rp. 1.200.000
Output Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Outcome Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Tahun 2022

Pagu Rp. 1.200.000
Output Koran.
Outcome Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana .

Tahun 2023

Pagu Rp. 1.318.900
Output Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana belanja.
Outcome Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2024

Pagu Rp. 1.318.900
Output Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana belanja.
Outcome Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 1.318.900
Output	Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana belanja.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 1.318.900
Output	Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana belanja.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

❖ Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Tahun 2021

Pagu	Rp. 4.000.000
Output	Terfasilitasinya kunjungan tamu.
Outcome	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 10.000.000
Output	Kunjungan yang terfasilitasi.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 10.999.890
Output	Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi dengan baik.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 10.999.890
Output	Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi dengan baik.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 10.999.890
Output	Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi dengan baik.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 10.999.890
Output	Persentase kunjungan tamu yang difasilitasi dengan baik.
Outcome	Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

❖ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tahun 2021

Pagu	Rp. 400.410.000
Output	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
Outcome	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 300.000.000
Output	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Outcome Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2023

Pagu Rp. 166.364.000

Output jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana sesuai rencana.

Outcome Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2024

Pagu Rp. 232.909.600

Output Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana sesuai rencana.

Outcome Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2025

Pagu Rp. 279.491.520

Output Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana sesuai rencana.

Outcome Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

Tahun 2026

Pagu Rp. 335.389.824

Output Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana sesuai rencana.

Outcome Persentase administrasi umum SKPD yang terlaksana.

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

❖ Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Tahun 2021

Pagu	Rp. 25.306.000
Output	Persentase tersedianya Meubelair.
Outcome	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 25.306.000
Output	Jumlah pengadaan meubel.
Outcome	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana Sesuai Aturan.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 27.836.600
Output	Persentase tersedianya mebel sesuai dengan RKBMD.
Outcome	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana Sesuai Aturan.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 27.836.600
Output	Persentase tersedianya Mebel sesuai dengan RKBMD.
Outcome	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana Sesuai Aturan.

❖ Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tahun 2022

Pagu	Rp. 210.000.000
Output	Jumlah paket pengadaan dan peralatan mesin lainnya.
Outcome	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana Sesuai Aturan.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 55.000.000
Output	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu.
Outcome	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana Sesuai Aturan.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 55.000.000
Output	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu.
Outcome	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana Sesuai Aturan.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 270.000.000
Output	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu.

Outcome Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana Sesuai Aturan.

❖ Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Tahun 2022

Pagu Rp. 10.000.000
Output Jumlah pengadaan aset tetap lainnya.
Outcome Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana Sesuai Aturan.

Tahun 2023

Pagu Rp. 11.000.000
Output Persentase Pengadaan Aset Tetap lainnya sesuai dengan rencana belanja dan ketentuan.
Outcome Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana Sesuai Aturan.

❖ Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tahun 2022

Pagu Rp. 2.500.000.000
Output Jumlah paket pengadaan yang bersifat dalam gedung.
Outcome Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana Sesuai Aturan.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 100.000.000
Output	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu.
Outcome	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana Sesuai Aturan.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 100.000.000
Output	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu.
Outcome	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana Sesuai Aturan.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 100,000,000
Output	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu.
Outcome	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana Sesuai Aturan.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 4.620.000.000
Output	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai ketentuan dan tepat waktu.

Outcome Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana Sesuai Aturan.

- ❖ Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tahun 2021

Pagu Rp. 1.512.534.000
Output Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan lainnya.
Outcome Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan.

Tahun 2022

Pagu Rp. 200.000.000
Output Jumlah Paket pengadaan yang bersifat dalam gedung
Outcome Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan.

Tahun 2023

Pagu Rp. 44.800.000
Output Jumlah Paket pengadaan yang bersifat dalam gedung
Outcome Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan.

Tahun 2024

Pagu Rp. 44.800.000
Output Jumlah Paket pengadaan yang bersifat dalam gedung

Outcome Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan.

Tahun 2025

Pagu Rp. 44.800.000

Output Jumlah Paket pengadaan yang bersifat dalam gedung

Outcome Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan.

Tahun 2026

Pagu Rp. 44.800.000

Output Jumlah Paket pengadaan yang bersifat dalam gedung

Outcome Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan.

- ❖ Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tahun 2022

Pagu Rp. 448.000.000

Output Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

Outcome Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana Sesuai Aturan.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tahun 2021

Pagu	Rp. 148.700.000
Output	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Outcome	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 172.700.000
Output	Pembayaran Jasa telpon, internet, air dan listrik. Jumlah pembayaran jasa Air Bersih Jumlah Bulan pembayaran Jasa Listrik Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Internet Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Telpon Persentase Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia sesuai rencana belanja.
Outcome	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 186.142.850
Output	Pembayaran Jasa telpon, internet, air dan listrik. Jumlah pembayaran jasa Air Bersih Jumlah Bulan pembayaran Jasa Listrik Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Internet Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Telpon Persentase Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia sesuai rencana belanja.

Outcome	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi.
Tahun 2024	
Pagu	Rp. 186.142.850
Output	Pembayaran Jasa telpon, internet, air dan listrik. Jumlah pembayaran Jasa Air Bersih Jumlah Bulan pembayaran Jasa Listrik Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Internet Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Telpon Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia sesuai rencana belanja.
Outcome	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi.
Tahun 2025	
Pagu	Rp. 186.142.850
Output	Pembayaran Jasa telpon, internet, air dan listrik. Jumlah pembayaran jasa Air Bersih Jumlah Bulan pembayaran Jasa Listrik Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Internet Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Telpon Persentase Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia sesuai rencana belanja.
Outcome	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi.
Tahun 2026	
Pagu	Rp. 186.142.850

Output	Pembayaran jasa telpon, internet, air dan listrik. Jumlah pembayaran jasa Air Bersih Jumlah Bulan pembayaran Jasa Listrik Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Internet Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Telpon Persentase Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia sesuai rencana belanja.
Outcome	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi.

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tahun 2021

Pagu	Rp. 284.300.000
Output	Persentase Jasa Kebersihan kantor. Persentase Jasa Kebersihan kantor. Persentase terselesainya jasa surat menyurat. Persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor.
Outcome	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 344.300.000
Output	Pembayaran jasa tenaga honorer/ pegawai kontrak.
Outcome	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 291.641.200
Output	Persentase jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia sesuai kebutuhan.

Outcome Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi.

Tahun 2024

Pagu Rp. 291.641.200

Output Persentase jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia sesuai kebutuhan.

Outcome Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi.

Tahun 2025

Pagu Rp. 291.641.200

Output Persentase jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia sesuai kebutuhan.

Outcome Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi.

Tahun 2026

Pagu Rp. 331.641.200

Output Persentase jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia sesuai kebutuhan.

Outcome Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi.

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

❖ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tahun 2021

Pagu	Rp. 155.400.000
Output	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara. Persentase Terfasilitasinya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional.
Outcome	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 200.400.000
Output	Jumlah Kendaraan Dinas perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan pemeliharaannya.
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 99.138.835
Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang terfasilitasi pajak dan pemeliharaanya sesuai rencana.
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 110.324.247
------	-----------------

Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang terfasilitasi pajak dan pemeliharaanya sesuai rencana.
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 122.348.566
Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang terfasilitasi pajak dan pemeliharaanya sesuai rencana.
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 185.274.708
Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang terfasilitasi pajak dan pemeliharaanya sesuai rencana.
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

❖ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tahun 2022

Pagu	Rp. 50.000.000
Output	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara.
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana

Tahun 2023

Pagu	Rp. 42.742.000
Output	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sesuai rencana.
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 45.947.650
Output	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sesuai rencana.
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 49.393.724
Output	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sesuai rencana.
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 53.098.253
Output	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sesuai rencana.
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

❖ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tahun 2021

Pagu	Rp. 127.000.000
Output	Persentase Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor. Persentase tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja. Terpeliharanya Gedung Kantor.
Outcome	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 102.000.000
Output	Jumlah paket sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara/rehabilitasi yg bersifat dalam gedung.
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 34.867.785
Output	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas sesuai rencana.
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 48.982.868
------	----------------

Output	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas sesuai rencana.
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 43.406.584
Output	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas sesuai rencana.
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 68.162.078
Output	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas sesuai rencana.
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

- ❖ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tahun 2022

Pagu	Rp. 60.000.000
Output	Jumlah paket sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara atau terrehabilitasi yang bersifat di luar gedung.

Outcome Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

Tahun 2023

Pagu Rp. 31.820.000

Output Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhab sesuai rencana.

Outcome Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

Tahun 2024

Pagu Rp. 34.206.500

Output Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhab sesuai rencana.

Outcome Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

Tahun 2025

Pagu Rp. 36.771.988

Output Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhab sesuai rencana.

Outcome Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

Tahun 2026

Pagu Rp. 39.529.886

Output	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhab sesuai rencana.
Outcome	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana.

B. Program Perencanaan Tenaga Kerja

6) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

❖ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

Tahun 2022

Pagu	Rp. 100.000.000
Output	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro.
Outcome	Tersedianya Informasi Ketenagakerjaan.

❖ Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

Tahun 2023

Pagu	Rp. 213.664.000
Output	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro.
Outcome	Tersedianya Informasi Ketenagakerjaan.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 200.000.000
Output	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro.
Outcome	Tersedianya Informasi Ketenagakerjaan.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 200.000.000
------	-----------------

Output	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro.
Outcome	Tersedianya Informasi Ketenagakerjaan.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 200.000.000
Output	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro.
Outcome	Tersedianya Informasi Ketenagakerjaan.

C. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

7) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Kompetensi

- ❖ Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Tahun 2021

Pagu	Rp. 247.000.000
Output	Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kerja.
Outcome	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam negeri.

Meningkatnya Pencari Kerja yang memiliki keterampilan kerja.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 443.000.000
Output	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam negeri.
Outcome	Meningkatnya Pencari Kerja yang memiliki keterampilan kerja.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 483.384.000
Output	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam Negeri (jumlah Pencaker yang mengikuti pendidikan berdasarkan klaster kompetensi).
Outcome	Meningkatnya Pencari Kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 683.000.000
Output	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam Negeri (jumlah Pencaker yang mengikuti pendidikan berdasarkan klaster kompetensi).
Outcome	Meningkatnya Pencari Kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 803.000.000
Output	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam Negeri (jumlah Pencaker yang mengikuti pendidikan berdasarkan klaster kompetensi).
Outcome	Meningkatnya Pencari Kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 923.000.000
------	-----------------

Output	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam Negeri (jumlah Pencaker yang mengikuti pendidikan berdasarkan klaster kompetensi).
Outcome	Meningkatnya Pencari Kerja yang memiliki Sertifikat Kompetensi.

- ❖ Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 18.000.000
Output	Jumlah lembaga pelatihan kerja dan sektor swasta yang berkerjasama.
Outcome	Tersedianya informasi ketenagakerjaan.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 30.000.000
Output	Jumlah lembaga pelatihan kerja dan sektor swasta yang berkerjasama.
Outcome	Tersedianya informasi ketenagakerjaan.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 30.000.000
Output	Jumlah lembaga pelatihan kerja dan sektor swasta yang berkerjasama.
Outcome	Tersedianya informasi ketenagakerjaan.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 42.000.000
Output	Jumlah lembaga pelatihan kerja dan sektor swasta yang berkerjasama.
Outcome	Tersedianya informasi ketenagakerjaan.

❖ Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

Tahun 2023

Pagu	Rp. 550.000.000
Output	Jumlah Sarana pelatihan kerja.
Outcome	Tersedianya informasi ketenagakerjaan.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 550.000.000
Output	Jumlah sarana pelatihan kerja.
Outcome	Tersedianya informasi ketenagakerjaan.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 1.000.000.000
Output	Jumlah sarana pelatihan kerja.
Outcome	Tersedianya informasi ketenagakerjaan.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 1.000.000.000
Output	Jumlah sarana pelatihan kerja.
Outcome	Tersedianya informasi ketenagakerjaan.

8) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

❖ Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Tahun 2021

Pagu	Rp. 41.750.000
Output	Jumlah LPKS yang memahami persyaratan akreditasi
Outcome	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

Tahun 2022

Pagu	Rp. 55.000.000
Output	Jumlah LPKS yang mengikuti Bimtek.
Outcome	Meningkatnya LPKS yang berkualitas

Tahun 2023

Pagu	Rp. 59.345.000
Output	Jumlah LPKS yang yang dibina.
Outcome	Meningkatnya LPKS yang berkualitas.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 55.000.000
Output	Jumlah LPKS yang yang dibina.
Outcome	Meningkatnya LPKS yang berkualitas.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 55.000.000
Output	Jumlah LPKS yang yang dibina.
Outcome	Meningkatnya LPKS yang berkualitas.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 55.000.000
Output	Jumlah LPKS yang dibina.
Outcome	Meningkatnya LPKS yang berkualitas.

9) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

❖ Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tahun 2022

Pagu	Rp. 50.000.000
Output	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya.
Outcome	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 53.845.000
Output	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya.
Outcome	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 60.000.000
Output	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya.
Outcome	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 65.000.000
Output	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya.
Outcome	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.

Tahun 2026

Pagu Rp. 68.500.000

Output Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya.

Outcome Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.

D. Program Penempatan Tenaga Kerja

10) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

❖ Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja

Tahun 2022

Pagu Rp. 10.000.000

Output Jumlah SMK yang tersosialisasi Bursa kerja Khusus (BKK).

Outcome Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Informal.

Tahun 2023

Pagu Rp. 9.845.000

Output Jumlah SMK yang Memberikan Layanan Antar Kerja.

Outcome Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Informal.

Tahun 2024

Pagu Rp. 10.000.000

Output Jumlah SMK yang Memberikan Layanan Antar Kerja.

Outcome Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Informal.

Tahun 2025

Pagu Rp. 10.000.000

Output Jumlah SMK yang Memberikan Layanan Antar Kerja.

Outcome Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Informal.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 10.000.000
Output	Jumlah SMK yang Memberikan Layanan Antar Kerja.
Outcome	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Informal.

❖ Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Tahun 2021

Pagu	Rp. 134.680.000
Output	Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pemagangan di Perusahaan.
Outcome	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Informal.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 36.000.000
Output	Jumlah siswa yang memahami Bimbingan Jabatan Pendaker.
Outcome	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Informal.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 38.445.000
Output	Jumlah Pendaker yang memahami Bimbingan Jabatan.
Outcome	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Informal.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 36.000.000
Output	Jumlah Pendaker yang memahami Bimbingan Jabatan.
Outcome	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Informal.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 36.000.000
Output	Jumlah Pencaker yang memahami Bimbingan Jabatan.
Outcome	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Informal.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 36.000.000
Output	Jumlah Pencaker yang memahami Bimbingan Jabatan.
Outcome	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Informal.

❖ Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

Tahun 2021

Pagu	Rp. 169.800.000
Output	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih untuk bekerja di Sektor Usaha Mandiri (Informal).
Outcome	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Informal.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 169.240.000
Output	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri Formal dan informal.
Outcome	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Informal.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 177.848.000
------	-----------------

Output	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri Formal dan Pencari Kerja/ Masyarakat yang Dilatih dilembaga pelatihan Kerja Swasta.
Outcome	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Informal.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 376.840.000
Output	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri Formal dan Pencari Kerja/ Masyarakat yang Dilatih dilembaga pelatihan Kerja Swasta.
Outcome	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Informal.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 400.480.000
Output	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri Formal dan Pencari Kerja/ Masyarakat yang Dilatih dilembaga pelatihan Kerja Swasta.
Outcome	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Informal.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 424.480.000
Output	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri Formal dan Pencari Kerja/ Masyarakat yang Dilatih dilembaga pelatihan Kerja Swasta.
Outcome	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Informal.

11) Kegiatan Pengeloaan Informasi Pasar Kerja

- ❖ Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyedian Informasi Pasar Kerja Online

Tahun 2021

Pagu	Rp. 54.400.000
Output	Jumlah buku Laporan Informasi Pasar Kerja.
Outcome	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Disektor Informal.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 97.800.000
Output	Audit Sertifikasi Iso.
Outcome	Tersedianya Sarana Penyaluran Tenaga Kerja, Informasi Pasar Kerja dan sarana pertemuan antara pencari kerja dan Perusahaan/Pemberi Kerja yang Membutuhkan tenaga Kerja.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 97.800.000
Output	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja.
Outcome	Tersedianya Sarana Penyaluran Tenaga Kerja, Informasi Pasar Kerja dan sarana pertemuan antara pencari kerja dan Perusahaan/Pemberi Kerja yang Membutuhkan tenaga Kerja.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 97.800.000
Output	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja.
Outcome	Tersedianya Sarana Penyaluran Tenaga Kerja, Informasi Pasar Kerja dan sarana pertemuan antara pencari kerja dan Perusahaan/Pemberi Kerja yang Membutuhkan tenaga Kerja.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 97.800.000
Output	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja.

Outcome Tersedianya Sarana Penyaluran Tenaga Kerja, Informasi Pasar Kerja dan sarana pertemuan antara pencari kerja dan Perusahaan/Pemberi Kerja yang Membutuhkan tenaga Kerja.

Tahun 2026

Pagu Rp. 97.800.000

Output Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja.

Outcome Tersedianya Sarana Penyaluran Tenaga Kerja, Informasi Pasar Kerja dan sarana pertemuan antara pencari kerja dan Perusahaan/Pemberi Kerja yang Membutuhkan tenaga Kerja.

❖ Sub Kegiatan Job Fair

Tahun 2021

Pagu Rp. 148.000.000

Output Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam egeri.

Outcome Tersedianya Sarana Penyaluran Tenaga Kerja, Informasi Pasar Kerja dan sarana pertemuan antara pencari kerja dan Perusahaan/Pemberi Kerja yang Membutuhkan tenaga kerja.

Tahun 2022

Pagu Rp. 173.000.000

Output Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam Negeri.

Outcome Tersedianya Sarana Penyaluran Tenaga Kerja, Informasi Pasar Kerja dan sarana pertemuan antara pencari kerja dan Perusahaan/Pemberi Kerja yang Membutuhkan tenaga kerja.

Tahun 2023

Pagu Rp. 188.716.000

Output	Jumlah Pencaker yang mendapat Informasi Bursa Tenaga Kera.
Outcome	Tersedianya Sarana Penyaluran Tenaga Kerja, Informasi Pasar Kerja dan sarana pertemuan antara pencari kerja dan Perusahaan/Pemberi Kerja yang Membutuhkan tenaga Kerja.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 223.000.000
Output	Jumlah Pencaker yang mendapat Informasi Bursa Tenaga Kerja.
Outcome	Tersedianya Sarana Penyaluran Tenaga Kerja, Informasi Pasar Kerja dan sarana pertemuan antara pencari kerja dan Perusahaan/Pemberi Kerja yang Membutuhkan tenaga Kerja.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 248.000.000
Output	Jumlah Pencaker yang mendapat Informasi Bursa Tenaga Kerja.
Outcome	Tersedianya Sarana Penyaluran Tenaga Kerja, Informasi Pasar Kerja dan sarana pertemuan antara pencari kerja dan Perusahaan/Pemberi Kerja yang Membutuhkan tenaga Kerja.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 273.000.000
Output	Jumlah Pencaker yang mendapat Informasi Bursa Tenaga Kerja.
Outcome	Tersedianya Sarana Penyaluran Tenaga Kerja, Informasi Pasar Kerja dan sarana pertemuan antara pencari kerja dan Perusahaan/Pemberi Kerja yang Membutuhkan tenaga Kerja.

E. Program Hubungan Industrial

12) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

❖ Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan

Tahun 2021

Pagu Rp. 39.450.000

Output Sosialisasi Sarana Hubungan Industrial (Pekerja).
Sosialisasi Sarana Hubungan Industrial (Perusahaan).

Outcome Meningkatnya Kepatuhan Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan yang telah disepakati.

Tahun 2022

Pagu Rp. 39.450.000

Output Jumlah pengusaha/pekerja yang memahami pentingnya PP/PKB serta mengetahui bagaimana tata cara pembuatan PP/PKB

Outcome Meningkatkanya mutu perusahaan, efisiensi dan efektifitas kinerja manajemen serta terjadinya kelangsungan perusahaan.

Tahun 2023

Pagu Rp. 45.450.000

Output Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata cara pembuatan PP/PKB.

Outcome Meningkatnya mutu perusahaan, efisiensi dan efektifitas kinerja manajemen serta terjadinya kelangsungan perusahaan.

Tahun 2024

Pagu Rp. 51.450.000

Output	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata cara pembuatan PP/PKB.
Outcome	Meningkatnya mutu perusahaan, efisiensi dan efektifitas kinerja manajemen serta terjaganya kelangsungan perusahaan.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 57.450.000
Output	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata cara pembuatan PP/PKB.
Outcome	Meningkatnya mutu perusahaan, efisiensi dan efektifitas kinerja manajemen serta terjaganya kelangsungan perusahaan.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 63.450.000
Output	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata cara pembuatan PP/PKB.
Outcome	Meningkatnya mutu perusahaan, efisiensi dan efektifitas kinerja manajemen serta terjaganya kelangsungan perusahaan.

- ❖ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja serta pengupahan

Tahun 2021

Pagu	Rp. 148.535.000
Output	Jumlah Pekerja yang memahami Struktur Skala Upah/ SISN/ UMP/ UMK. Jumlah Perusahaan yang memahami Struktur Skala Upah/ SISN/ UMP/ UMK Penerbitan SK Upah Minimum Kota.

Outcome Meningkatnya Kepatuhan Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan yang telah disepakati.

Tahun 2022

Pagu Rp. 148.535.000

Output Jumlah pengusaha/pekerja yang memahami struktur skala upah dan Jaminan Sosial.

Outcome Meningkatkanya mutu perusahaan, efisiensi, dan efektifitas kinerja manajemen serta terjaganya kelangsungan perusahaan.

Tahun 2023

Pagu Rp. 164.535.000

Output Jumlah Perusahaan yang menerapkan struktur dan skala upah, Menerapkan UMK dan Kepesertaan Jaminan Sosial.

Outcome Meningkatkanya mutu perusahaan, efisiensi, dan efektifitas kinerja manajemen serta terjaganya kelangsungan perusahaan.

Tahun 2024

Pagu Rp. 180.535.000

Output Jumlah Perusahaan yang menerapkan struktur dan skala upah, Menerapkan UMK dan Kepesertaan Jaminan Sosial.

Outcome Meningkatkanya mutu perusahaan, efisiensi, dan efektifitas kinerja manajemen serta terjaganya kelangsungan perusahaan.

Tahun 2025

Pagu Rp. 196.535.000

Output Jumlah Perusahaan yang menerapkan struktur dan skala upah, Menerapkan UMK dan Kepesertaan Jaminan Sosial.

Outcome Meningkatkanya mutu perusahaan, efisiensi, dan efektifitas kinerja manajemen serta terjaganya kelangsungan perusahaan.

Tahun 2026

Pagu Rp. 212.535.000

Output Jumlah Perusahaan yang menerapkan struktur dan skala upah, Menerapkan UMK dan Kepesertaan Jaminan Sosial.

Outcome Meningkatkanya mutu perusahaan, efisiensi, dan efektifitas kinerja manajemen serta terjaganya kelangsungan perusahaan.

13) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- ❖ Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tahun 2021

Pagu Rp. 29.125.000

Output Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian PHI/PHK diluar Pengadilan melalui mediasi (Pekerja).

Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian PHI/PHK diluar Pengadilan melalui mediasi (Perusahaan).

Outcome Meningkatnya Kepatuhan Pekerja terhadap Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan yang telah disepakati.

Tahun 2022

Pagu Rp. 29.125.000

Output Jumlah Pekerja/Pengusaha yang memahami cara pencegahan PHI/PHK di luar dan di dalam pengadilan HI.

Outcome	Menurunnya Perselisihan PHI/PHK.
Tahun 2023	
Pagu	Rp. 38.037.000
Output	Jumlah Perusahaan yang memahami cara pencegahan PHI/PHK di luar dan di dalam pengadilan HI.
Outcome	Menurunnya Perselisihan PHI/PHK.
Tahun 2024	
Pagu	Rp. 44.037.000
Output	Jumlah Perusahaan yang memahami cara pencegahan PHI/PHK di luar dan di dalam pengadilan HI.
Outcome	Menurunnya Perselisihan PHI/PHK.
Tahun 2025	
Pagu	Rp. 50.037.000
Output	Jumlah Perusahaan yang memahami cara pencegahan PHI/PHK di luar dan di dalam pengadilan HI.
Outcome	Menurunnya Perselisihan PHI/PHK.
Tahun 2026	
Pagu	Rp. 56.037.000
Output	Jumlah Perusahaan yang memahami cara pencegahan PHI/PHK di luar dan di dalam pengadilan HI.
Outcome	Menurunnya Perselisihan PHI/PHK.

- ❖ Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tahun 2021

Pagu	Rp. 2.125.000
Output	Sosialisasi Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan). Sosialisasi Tata Cara Pembuatan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama (Pekerja).
Outcome	Berkurangnya Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan.

- ❖ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi

Tahun 2021

Pagu	Rp. 2.125.000
Output	Dokumen LKS Bipartit.
Outcome	Berkurangnya Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 2.125.000
Output	Jumlah Anggota Serikat Pekerja/serikat Buruh yang telah terverifikasi.
Outcome	Berkurangnya Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 2.125.000
Output	Jumlah Anggota Serikat Pekerja/serikat Buruh yang telah terverifikasi.

Outcome Berkurangnya Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan Ketenagakerjaan.

Tahun 2024

Pagu Rp. 2.125.000
Output Jumlah Anggota Serikat Pekerja/serikat Buruh yang telah
terverifikasi.
Outcome Berkurangnya Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan Ketenagakerjaan.

Tahun 2025

Pagu Rp. 2.125.000
Output Jumlah Anggota Serikat Pekerja/serikat Buruh yang telah
terverifikasi.
Outcome Berkurangnya Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan Ketenagakerjaan.

Tahun 2026

Pagu Rp. 2.125.000
Output Jumlah Anggota Serikat Pekerja/serikat Buruh yang telah
terverifikasi.
Outcome Berkurangnya Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan Ketenagakerjaan.

❖ Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit
Daerah Kabupaten/kota

Tahun 2021

Pagu Rp. 78.240.000
Output Jumlah Pekerja yang memahami Peraturan Ketenagakerjaan.
Jumlah Pengusaha yang memahami Peraturan Ketenagakerjaan.

Outcome Berkurangnya Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan Ketenagakerjaan.

Tahun 2022

Pagu Rp. 78.240.000
Output Jumlah Rekomendasi bahan pertimbangan saran terkait penyusunan kebijakan dalam mencegah permasalahan ketenagakerjaan.
Outcome Menurunnya Perselisihan PHI/PHK.

Tahun 2023

Pagu Rp. 78.240.000
Output Jumlah laporan pertimbangan saran terkait penyusunan kebijakan dalam mencegah permasalahan ketenagakerjaan.
Outcome Menurunnya Perselisihan PHI/PHK.

Tahun 2024

Pagu Rp. 78.240.000
Output Jumlah laporan pertimbangan saran terkait penyusunan kebijakan dalam mencegah permasalahan ketenagakerjaan.
Outcome Menurunnya Perselisihan PHI/PHK.

Tahun 2025

Pagu Rp. 78.240.000
Output Jumlah laporan pertimbangan saran terkait penyusunan kebijakan dalam mencegah permasalahan ketenagakerjaan
Outcome Menurunnya Perselisihan PHI/PHK.

Tahun 2026

Pagu Rp. 78.240.000

Output	Jumlah Pekerja yang memahami Peraturan Ketenagakerjaan.
	Jumlah Pengusaha yang memahami Peraturan Ketenagakerjaan.
Outcome	Menurunnya Perselisihan PHI/PHK.

F. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

14) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- ❖ Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi

Tahun 2021

Pagu Rp. 22.000.000

Output Jumlah Dokumen Koperasi yang termutahirkan Data dan Keragaannya

Outcome Meningkatnya Jumlah Koperasi dan UMKM yang tertata perangkat Peraturannya, Organiasasi dan Tatalaksana serta termutahirkannya Data dan Keragaan Koperasi dan UMK

- ❖ Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Tahun 2021

Pagu Rp. 77.550.000

Output Jumlah Koperasi yang ditata perangkat peraturannya.

Jumlah Koperasi yang ditata organisasi dan tatalaksananya.

Outcome Meningkatnya Jumlah Koperasi dan UMKM yang tertata perangkat Peraturannya, Organiasasi dan Tatalaksana serta termutahirkannya Data dan Keragaan Koperasi dan UMK.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 361.895.000
Output	Jumlah Koperasi/orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan koperasi.
Outcome	Meningkatnya Koperasi yang tertata perangkat Peraturannya, Organisasi dan Tatalaksana.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 302.084.500
Output	Jumlah Koperasi yang dibina kepatuhannya terhadap Peraturan dan Perundang - undangan koperasi.
Outcome	Meningkatnya Koperasi yang tertata perangkat Peraturannya, Organisasi dan Tatalaksana.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 488.385.000
Output	Jumlah Koperasi yang dibina kepatuhannya terhadap Peraturan dan Perundang- undangan koperasi.
Outcome	Meningkatnya Koperasi yang tertata perangkat Peraturannya, Organisasi dan Tatalaksana.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 488.385.000
Output	Jumlah Koperasi yang dibina kepatuhannya terhadap Peraturan dan Perundang- undangan koperasi.
Outcome	Meningkatnya Koperasi yang tertata perangkat Peraturannya, Organisasi dan Tatalaksana.

	Tahun 2026
Pagu	Rp. 488.385.000
Output	Jumlah Koperasi yang dibina kepatuhannya terhadap Peraturan dan Perundang- undangan koperasi.
Outcome	Meningkatnya Koperasi yang tertata perangkat Peraturannya, Organisasi dan Tatalaksana.

G. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

15) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

❖ Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Tahun 2021

Pagu	Rp. 462.491.250
Output	Jumlah Kelompok Masyarakat yang mengusulkan Badan Hukum Koperasi. Jumlah Koperasi. Jumlah SDM koperasi dan UMK yang meningkat kapasitasnya.
Outcome	Meningkatnya Kapasitas SDM Koperasi.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 234.770.000
Output	Jumlah SDM Koperasi/Orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Outcome	Meningkatnya Kapasitas SDM Koperasi.

Tahun 2023

Pagu Rp. 462.660.000

Output Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Outcome Meningkatnya Kapasitas SDM Koperasi.

Tahun 2024

Pagu Rp. 462.660.000

Output Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Outcome Meningkatnya Kapasitas SDM Koperasi.

Tahun 2025

Pagu Rp. 462.660.000

Output Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Outcome Meningkatnya Kapasitas SDM Koperasi.

Tahun 2026

Pagu Rp. 462.660.000

Output Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Outcome Meningkatnya Kapasitas SDM Koperasi.

H. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- 16) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- ❖ Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/ Kota.

Tahun 2021

Pagu	Rp. 35.000.000
Output	Jumlah Koperasi dan UMK yang tersosialisasi Permodalan.
Outcome	Meningkatnya akses permodalan usaha Koperasi.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 46.185.000
Output	Jumlah Koperasi yang mengikuti Sosialisasi.
Outcome	Meningkatnya Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Koperasi.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 196.167.000
Output	Jumlah Koperasi yang dibina Usaha, Pemasaran, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi.
Outcome	Meningkatnya Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Koperasi.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 246.250.500
------	-----------------

Output	Jumlah Koperasi yang dibina Usaha, Pemasaran, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi.
Outcome	Meningkatnya Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Koperasi.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 296.334.000
Output	Jumlah Koperasi yang dibina Usaha, Pemasaran, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi.
Outcome	Meningkatnya Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Koperasi.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 296.334.000
Output	Jumlah Koperasi yang dibina Usaha, Pemasaran, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi.
Outcome	Meningkatnya Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Koperasi.

I. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

17) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguanan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

❖ Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro

Tahun 2021

Pagu	Rp. 189.960.000
Output	Jumlah UMKM yang dibina dan didampingi.
	Jumlah UMKM yang memiliki jaringan dan membangun kemitraan dengan koperasi.
Outcome	Jumlah UMKM yang yang terfasilitasi Permodalan.
	Meningkatnya akses permodalan bagi Koperasi dan UMK.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 48.440.000
Output	Jumlah Usaha Mikro yang bermitra.
Outcome	Meningkatnya usaha Mikro yang berkembang usahanya.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 881.483.650
Output	Jumlah Usaha Mikro yang dibina kemitraannya.
Outcome	Meningkatnya usaha Mikro yang berkembang usahanya.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 881.483.650
------	-----------------

Output	Jumlah Usaha Mikro yang dibina kemitraannya.
Outcome	Meningkatnya usaha Mikro yang berkembang usahanya.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 881.483.650
Output	Jumlah Usaha Mikro yang dibina kemitraannya.
Outcome	Meningkatnya usaha Mikro yang berkembang usahanya.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 881.483.650
Output	Jumlah Usaha Mikro yang dibina kemitraannya.
Outcome	Meningkatnya usaha Mikro yang berkembang usahanya.

❖ Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Tahun 2022

Pagu	Rp. 42.410.000
Output	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi perizinannya.
Outcome	Meningkatnya usaha Mikro yang berkembang usahanya.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 46.651.000
Output	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi perizinannya.
Outcome	Meningkatnya usaha Mikro yang berkembang usahanya.

Tahun 2024

Pagu	Rp. 49.655.000
Output	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi perizinannya.
Outcome	Meningkatnya usaha Mikro yang berkembang usahanya.

Tahun 2025

Pagu	Rp. 49.655.000
Output	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi perizinannya.
Outcome	Meningkatnya usaha Mikro yang berkembang usahanya.

Tahun 2026

Pagu	Rp. 49.655.000
Output	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi perizinannya.
Outcome	Meningkatnya usaha Mikro yang berkembang usahanya.

❖ Sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Tahun 2021

Pagu	Rp. 1.089.380.000
Output	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan UMKM. Jumlah WUB yang mendapat Penghargaan. Terciptanya Wirausaha Baru.
Outcome	Meningkatnya Omzet UMKM melalui media promosi.

Tahun 2022

Pagu	Rp. 858.290.250
Output	Jumlah pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro.
Outcome	Meningkatnya usaha Mikro yang berkembang usahanya.

Tahun 2023

Pagu	Rp. 902.709.225
Output	Jumlah Usaha Mikro yang di berdayakan kelembagaan potensinya.

Outcome	Meningkatnya usaha Mikro yang berkembang usahanya.
Tahun 2024	
Pagu	Rp. 902.709.225
Output	Jumlah Usaha Mikro yang di berdayakan kelembagaan potensinya.
Outcome	Meningkatnya usaha Mikro yang berkembang usahanya.
Tahun 2025	
Pagu	Rp. 902.709.225
Output	Jumlah Usaha Mikro yang di berdayakan kelembagaan potensinya.
Outcome	Meningkatnya usaha Mikro yang berkembang usahanya.
Tahun 2026	
Pagu	Rp. 902.709.225.
Output	Jumlah Usaha Mikro yang di berdayakan kelembagaan potensinya.
Outcome	Meningkatnya usaha Mikro yang berkembang usahanya.

J. Program Pengembangan UMKM

18) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

- ❖ Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta, Desain dan Teknologi.

Tahun 2021

Pagu	Rp. 474.765.000
Output	Jumlah Produk UMKM yang terpromosi.

Outcome Terpromosikannya Produk UMKM agar meningkatnya Skala Usaha menjadi Usaha Kecil.

Tahun 2022

Pagu Rp. 1.093.979.000

Output Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi.

Outcome Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro dalam berusaha.

Tahun 2023

Pagu Rp. 1.071.503.400

Output Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangannya.

Outcome Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro dalam berusaha.

Tahun 2024

Pagu Rp. 1.071.503.400

Output Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangannya.

Outcome Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro dalam berusaha.

Tahun 2025

Pagu Rp. 1.071.503.400

Output Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangannya.

Outcome Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro dalam berusaha.

Tahun 2026

Pagu Rp. 1.071.503.400

Output Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangannya.

Outcome Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro dalam berusaha.

Tabel T-C27
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
 Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Tahun 2021 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Awal	Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra SKPD (2021-2026)																		Keterangan Sub Kegiatan/Kegiatan	Keterangan Sasaran		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target		Rp		Target		Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Meningkatnya Peningkatan kapasitas dan kualitas anggaran emeritahan	Meningkatnya Nilai Akumulasi Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja		Nilai akumulasi kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja					78 (BB)			78,5 (BB)			79 (BB)			79,5 (BB)			80 (A)			80 (A)				27
			Persentase Peningkatan nilai akumulasi kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja						1,08	%		0,84	%		0,84	%		0,84	%		0,84	%		0,82	%		
		2.17.01	PROGRAM PENUNGANAN URUWAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	%	10.772.887.781	100	%	10.470.101.886	100	%	10.047.002.846	100	%	10.187.388.808	100	%	10.188.228.808	100	%	10.022.992.476	100	%	99.999.949.401	
			Ingrat kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi kesekretariatan (kategori)																								
			Ingrat kualitas penerapanan perangkat daerah (kategori)																								
		2.17.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	%	18.000.000																			18.000.000
			Terediannya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%				100	%	23.800.000																23.800.000

			Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan						100	%	26.848.870	100	%	24.800.000	100	%	24.800.000	100	%	24.800.000	100	%	24.848.870				
	2.17.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Rencita dan Renda	2 Dokumen	2,00	Dokumen	6.029.000																			6.029.000	
			Tersusunnya Dokumen PK, PK Perubahan, KU-RKT dan RKT Perubahan	5 Dokumen	5	Dokumen																					
			Tersusunnya Dokumen Rencita, Renda dan Renda Perubahan	3 Dokumen	3	Dokumen																					
			Tersusunnya Dokumen Rencita, Renda, Renda Perubahan,PK,PK Perubahan,KU-RKT dan RKT Perubahan yg tersusun	8 Dokumen			8	Dokumen	6.029.000																	8 Dokumen	6.029.000
			Jumlah dokumen Perencanaan (Dokumen Rencita, Renda, Renda Perubahan,PK,PK Perubahan,KU-RKT dan RKT Perubahan) yang tersusun sesuai dengan ketentuan						8	Dokumen	6.631.700	8	Dokumen	6.029.000	8	Dokumen	24.718.700										
	2.17.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen			+	1	Dokumen	2.000.000															1	Dokumen	2.000.000
			Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun sesuai ketentuan						1	Dokumen	2.200.000	1	Dokumen	2.200.000	1	Dokumen	2.200.000	1	Dokumen	2.200.000	4	Dokumen	8.800.000				
	2.17.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen			+	1	Dokumen	2.000.000															1	Dokumen	2.000.000

		Jumlah Dokumen Penetapan RKA SKPD yang tersusun sesuai kotentuan						1	Dokumen	2.200.000	1	Dokumen	2.200.000	1	Dokumen	2.200.000	1	Dokumen	2.200.000	5	Dokumen	8.800.000			
2.17.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Intisari Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LPPD, LKPJ dan IKK	2 Dokumen					2	Dokumen	2.000.000											2	Dokumen	2.000.000		
		Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ yang tersusun sesuai kotentuan							2	Dokumen	2.200.000	2	Dokumen	2.200.000	2	Dokumen	2.200.000	2	Dokumen	2.200.000	2	Dokumen	8.800.000		
2.17.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan	2 Laporan	2	Laporan	11.971.000																2	Laporan	11.971.000	
		Tersusunnya Laporan Kinerja, Realisasi Rok dan Keuangan (RRK), LPPD, LKPJ dan IKK	4 Dokumen	4	Dokumen																				
		Laporan Evaluasi Rencana Renda dan RRK	3 Laporan					3	Laporan	11.471.000												3	Laporan	11.471.000	
		Jumlah Laporan Evaluasi Rencana, Renda dan RRK yang sesuai dengan kotentuan dan tepat waktu																							
2.17.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	%	7.837.128,79																100	%	7.837.128,79	
		Persentase Layanan Administrasi Keuangan	100%				100	%	8.387.884,88													100	%	8.387.884,88	
		Cekungan Dokumen penetapan keuangan yang lengkap dan sesuai kotentuan								100	%	8.721.586,00	100	%	8.721.586,00	100	%	8.721.586,00	100	%	8.721.586,00	100	%	34.888.380,00	
2.17.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	-Persentase Gaji dan Tunjangan yang di bayarkan	100%	100	%	7.831.376,79				100	%	0										100	%	7.831.376,79	
		-Persentase Pembayaran Jaminan Pemerintahan Kesehatan PNS	100%	100	%					100	%	0													

		Jumlah ASN yang di bayar gaji dan tunjangan	53 Orang			53	Orang	8.366.419.663								100	%	8.366.419.663		
		Jumlah ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan				60	Orang	8.700.000.000	60	orang	8.700.000.000	60	orang	8.700.000.000	60	orang	8.700.000.000	60	orang	34.800.000.000
		Persentase Gaji dan Tunjangan yang ditayangkan tepat waktu				100	%		100	%		100	%		100	%	100	%		
		Persentase Pembayaran Jaminan Kesehatan Karyawan PNS yang ditanggung SKPD				100	%		100	%		100	%		100	%	100	%		
		Persentase Pembayaran Jaminan Kelebihan Kata Plus dan Jaminan Kamatan PNS yang ditanggung SKPD																		
2.17.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Terselesainya Administrasi Keuangan	100%	100	%	5.750.000										100	%	5.750.000		
		Terselesainya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Bulan			12	Bulan	5.750.000								12	Bulan	5.750.000		
		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang difasilitasi sejauh dengan ketentuan				100	%	5.750.000	100	%	5.750.000	100	%	5.750.000	100	%	5.750.000	100	%	23.000.000
2.17.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Teredasinya Laporan Keuangan yang tepat waktu	1 laporan			* 1	Laporan	1.540.000								1	Laporan	1.540.000		
		Persentase laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun sesuai dengan SAP dan tepat waktu				100	%	1.540.000	100	%	1.540.000	100	%	1.540.000	100	%	1.540.000	100	%	6.160.000

		2.17.01.2.02.06	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tanggapan Pemeriksaan	1 Laporan		*	1 Laporan	1.000.000									1 Laporan	1.000.000					
				Persentase Tanggapan pemeriksaan yang diselesaikan tepat waktu						100	%	1.000.000	100	%	1.000.000	100	%	1.000.000	100	%	4.000.000			
		2.17.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu	4 Laporan		*	4 Laporan	13.275.000										4 Laporan	13.275.000				
				Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu						4	Laporan	13.275.000	4	Laporan	13.275.000	4	Laporan	13.275.000	4	Laporan	53.100.000			
		2.17.01.2.02.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik daerah	100%				100	%	3.000.000									100	%	3.000.000		
				Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersusun sesuai ketentuan						100	%	3.000.000	100	%	3.000.000	100	%	3.000.000	100	%	3.000.000	100	%	12.000.000
		2.17.01.2.02.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen RKBMID, RKBMDO, Perubahan, RKPBMID, RKPBMDO Perubahan	4 Dokumen		*	4 Dokumen	3.000.000										4 Dokumen	3.000.000				
				Jumlah dokumen Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun sesuai						4	Dokumen	3.300.000	4	Dokumen	3.300.000	4	Dokumen	3.300.000	4	Dokumen	3.300.000	4	Dokumen	13.200.000
		2.17.01.2.06	Kegiatan Administrasi Kepengawalan Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Bumber Daya Aparatur	100%	100	%	28.700.000	100	%	38.000.000									100	%	82.700.000		
				Persentase Administrasi Kepengawalan Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan						100	%	10.000.000	100	%	38.000.000	100	%	10.000.000	100	%	38.000.000	100	%	82.000.000

	2.17.01.2.05.01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pogawai	Jumlah Pakalan Saatlangen	100%	44	Stsl	26.700.000													44	Stsl	26.700.000		
			Jumlah pakalan saatlangen yang di beli	100%				60	Stsl	36.000.000										60	Stsl	36.000.000		
			Jumlah Pengadaan Mesin Kartu Absensi																					
			Jumlah Pengadaan Pakalan Khusus Hari-Hari tentu	100%					60	Stsl	10.000.000	60	Stsl	36.000.000	60	Stsl	10.000.000	60	Stsl	36.000.000	60	Stsl	92.000.000	
			Jumlah Pengadaan pakalan saatlangen																					
	2.17.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	%	837.801.000													100	%	837.801.000		
			Persentase Layanan Administrasi umum	100%				100	%	888.811.000													888.811.000	
			Cakupan administrasi umum yang terpenuhi	100%						100	%	418.298.700	100	%	486.146.624	100	%	666.268.897	100	%	828.041.801	100	%	2.082.746.222
	2.17.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100	%	4.000.000													100	%	4.000.000		
			Pengadaan komponen instalasi listrik	400 Buah				400	Buah	20.000.000										400	Buah	20.000.000		
			Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia sesuai Rencana belum							100	%	7.212.592	100	%	7.212.592	100	%	7.212.592	100	%	7.212.592	100	%	28.830.368
	2.17.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Perlakuan dan Perengkapan Kantor	Pengadaan penyediaan perlakuan dan perengkapan kantor	3 Paket				1	Unit	10.000.000										1	Unit	10.000.000		
			Persentase tersedianya Perlakuan dan Perengkapan Kantor sesuai Rencana belum							100	%	11.385.338	100	%	11.385.338	100	%	11.385.338	100	%	11.385.338	100	%	45.541.328
	2.17.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Perlakuan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Perlakuan Rumah Tangga	100%	100	%	40.870.000													100	%	40.870.000		

			Pengadaan penyediaan peralatan rumah tangga	1000 Bahan, Paket			1000, dan 1 Bahan, Paket	140.870.000									1000, dan Bahan Paket 1	140.870.000	
			Persentase terhadanya peralatan rumah tangga sejauh mencapaian belanja					100 %		81.004.770	100 %	81.004.770	100 %	81.004.770	100 %	81.004.770	100 %	324.079.080	
2.17.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terhadanya Alat Tulis Kantor	100% 100 %	173.841.000	100 %	199.841.000	100 %	123.013.220	100 %	135.314.544	100 %	148.845.997	100 %	163.730.597	100 %	944.586.358			
		Amplop Putih No.110		168	Kotak												168	Kotak	0
		Lakban		168	Bahan												168	Bahan	
		G/ Staples No.10		20	Bahan												20	Bahan	
		Other Folio		420	Bahan												420	Bahan	
		Map Snailhectare		840	Bahan												840	Bahan	
		Map plastik Pakai Jepit		30	Bahan												30	Bahan	
		Dokute Folio 100		14	Bahan												14	Bahan	
		Buku Agenda Bantul Keluar Masuk		15	Bahan												15	Bahan	
		Cutter L-800		168	Bahan												168	Bahan	
		Bindir Clip 155 Width 32 mm		168	Kotak												168	Kotak	
		Bindir Clip 280 Width 51 mm		168	Bahan												168	Bahan	
		Trigonal Clip No.3		140	Bahan												140	Bahan	
		Gunting Kertas Ukuran Besar		84	Pak												84	Pak	
		Bolasi Kecil		249	Bahan												249	Bahan	
		Kertas Pak		8	Pak												8	Pak	
		Kertas HVG A4 70 Gram		170	Rim												170	Rim	
		Lem Cair		252	Bahan												252	Bahan	
		Lem Stik 21 gram		420	Bahan												420	Bahan	

		Map Batik Ukuran Folio, Motif Batik, 650 gram	84	Pak											84	Pak		
		Penggaris Basi	168	Kotak											168	Kotak		
		Pensil	420	Buah											420	Buah		
		Penghapus Paper Tuis	10	Pak											10	Pak		
		Penghapus Pulpen	168	Buah											168	Buah		
		Pila Fox	4	Buah											4	Buah		
		Pulpen Blasa	500	Buah											500	Buah		
		Batiner	300	Buah											300	Buah		
		Spidol White Board	420	Buah											420	Buah		
		Spidol Permanen	110	Buah											110	Buah		
		Stabilo	170	Kotak											170	Kotak		
		Staples No.10	20	Buah											20	Buah		
		Stampel Dinas	5	Pak											5	Pak		
		Bal Stempel	20	Buah											20	Buah		
		Post-it 653 (Size 34,9 x 47,65 mm)	168	Buah											168	Buah		
		Post-it 653 (Size 47,6 x 73 mm)	84	Buah											84	Buah		
		Tangkap Isi	14	Buah											14	Buah		
		Amplop Putih No.90	168	Kotak											168	Kotak		
		Kertas HVS F4 / Folio 70 Gram	381	Rim											381	Rim		
		Map Batik	170	Pak											170	Pak		
		Pajubong Kertas	30	Buah											30	Buah		
		Persentase tersedianya bahan logistik kantor sesuai rencana belanja																

		217012.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengondaan	Jumlah Cetakan	1 Tahun	1 Tahun	13.280.000											1 Tahun	13.280.000	
			Jumlah Pengondaan	1 Tahun	1 Tahun															
			Amplop SKPD	15 Kotak			15	Kotak	15.000.000									15	Kotak	15.000.000
			Map SKPD	500 Lembar			500	Lembar										500	Lembar	
			Blanko Disposisi	60 Buku			60	Buku										60	Buku	
			Spanduk	20			20	Motor										20	Motor	
			Jumlah cetak yang dilaksanakan						40	buku	15.000.000	45	Buku	15.000.000	45	Buku	15.000.000	45	Buku	60.000.000
			Jumlah Pengondaan yang dilaksanakan						34810	Lembar	36000	Lembar	36000	Lembar	36000	Lembar	36000	Lembar	36000	Lembar
		217012.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Pustaka Perundang-undangan	persentase tersedianya bahan bacaan dan pustaka perundang-undangan	100%	100	%	1.200.000										100	%	1.200.000
			Arsip	200	eksemplar			200	eksemplar	1.200.000								200	eksemplar	1.200.000
			Persentase tersedianya bahan bacaan dan pustaka perundang-undangan sesuai rencana belanja						100	%	1.318.900	100	%	1.318.900	100	%	1.318.900	100	%	5.275.600
		217012.06.07	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersediananya kunjungan tamu	100%	100	%	4.000.000										100	%	4.000.000
			Kunjungan yg terdokumentasi	25 kali			25	kali	10.000.000									25	kali	10.000.000
			Persentase kunjungan tamu yang dilaksanakan dengan baik						100	%	10.999.999	100	%	10.999.999	100	%	10.999.999	100	%	43.999.995
		217012.06.09	Sub Kegiatan Penyeleksian Rapat Koordinasi dan Konvulen SKPD	Terdokumentasi Rapat Koordinasi dan Konvulen Kultur Organisasi	100%	100	%	400.410.000										100	%	400.410.000
			Laporan hasil koordinasi dan konvulen kultur organisasi	1 Laporan			1	Laporan	300.000.000									1 Laporan	300.000.000	

				Jumlah laporan Rapot Koordinasi dan Konvulen SKPD yang sejalan dengan rencana					1	Laporan	166.364.000	1	Laporan	232.939.600	1	Laporan	279.491.500	1	Laporan	335.169.824	1	Laporan	1.014.154.944					
		217012.07	Kegiatan Pengabdian Bering Milik Desa/Pemungut Uraian Pemerintah Desa	Persentase Terpenuhinya Pemungut Uraian Pemerintah Desa	100%	100	%	1.637.840.000														100	%	1.637.840.000				
				Terpenuhinya bering milik desa/pemungut uraian pemerintah desa	100%				100	%	3.393.306.000	100	%	183.636.600	100	%	199.800.000	100	%	144.800.000	100	%	4.747.656.600	100	%	8.669.179.200		
		217012.07.05	Sub Kegiatan Pengabdian Matal	Persentase tercapainya Matal	100%	100	%	25.306.000															100	%	25.306.000			
				Jumlah pengabdian matal	1 unit				1	Unit	25.306.000												1	Unit	25.306.000			
				Persentase tercapainya matal sesuai dengan RKEBD																			100	%	27.036.600	100	%	55.873.200
		217012.07.06	Sub Kegiatan Pengabdian Penelitian dan Masin Lainnya	Jumlah poket pengabdian dan penelitian masin lainnya	1 unit			-	1	poket	210.000.000												1	poket				
				Jumlah pengabdian penelitian dan masin lainnya sesuai ketentuan dan rapor pelaksana																			1	poket				
		217012.07.07	Sub Kegiatan Pengabdian Aset Tempat Ibadah	Jumlah pengabdian asset tempat ibadah	1 unit			-	1	unit	10.000.000												1	unit	10.000.000			
				Persentase pengabdian asset tempat ibadah sesuai dengan rencana halaman dan ketentuan																			100	%	11.000.000	100	%	22.000.000
		217012.07.09	Sub Kegiatan Pengabdian Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah poket pengabdian yg berada dalam gedung	2 poket			-	2	poket	2.500.000.000												2	poket	2.500.000.000			

			Jumlah pengeluaran gedung kantor atau bangunan lainnya secara kewenangan dan tetap wajar					1	Oleh	100.000.000	1	Oleh	100.000.000	1	Oleh	100.000.000	1	Oleh	4.620.000.000	1	Oleh	4.920.000.000			
		2170120710	Sub Kegiatan Pengeluaran Sosial dan Prasosial Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sosial dan Prasosial Gedung Kantor Bangunan Lainnya	100	%	1.512.534.000				0								100	%	1.512.534.000				
			Jumlah pokok pengeluaran yg berbentuk dalam gedung					200.000.000																	
			Persentase Pengeluaran Sosial dan Prasosial gedung kantor atau bangunan lainnya secara kewenangan dan tetap wajar						100	%	44.800.000	100	%	44.800.000	100	%	44.800.000	100	%	44.800.000	100	%	179.200.000		
		2170120711	Sub Kegiatan Pengeluaran Sosial dan Prasosial Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pokok pengeluaran sosial dan prasosial pendidikan gedung kantor atau bangunan lainnya	-	1	Pokok	448.000.000											1	Pokok	448.000.000				
			Persentase pengeluaran sosial dan prasosial pendidikan gedung kantor atau bangunan lainnya secara kewenangan dan tetap wajar						100	%		100	%		100	%		100	%		100	%	0		
		21701208	Hajatan Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	100%	100	%	453.000.000	100	%	617.000.000	100	%	477.784.060	100	%	477.784.060	100	%	617.784.060	100	%	2.901.156.200		
		2170120802	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100	%	148.700.000												100	%	148.700.000			
			Pembayaran jasa telepon, internet, air dan listrik	12 Bulan					12	Bulan	172.700.000									12	Bulan	172.700.000			
			12 Bulan	Pembayaran Jasa Air Bersih						12	Bulan	186.142.850	12	Bulan	186.142.850	12	Bulan	186.142.850	12	Bulan	186.142.850	12	Bulan	744.971.400	

			jumlah Bulan Pembayaran Jasa Air Bersih					12	Bulan	106.142.850	12	Bulan		106.142.850	12	Bulan	106.142.850	12	Bulan	106.142.850	12	Bulan	744.571.400					
			jumlah Bulan Pembayaran Jasa Listrik					12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan				
			jumlah Bulan Pembayaran Jasa Internet					12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan				
			jumlah Bulan Pembayaran Jasa Telepon					12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan				
			Percentase jasa komunikasi, jumlah daya air dan listrik yang teredia sesuai rencana sejauh					100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%				
	217012.08.04	Sab Kepatihan Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Percentase Jasa Kebutuhan kantor	100%	100	%	384.300.000																			100	%	384.300.000
			Percentase Jasa Kebutuhan kantor	100%	100	%																				100	%	
			percentase tersedianya jasa water supply	100%	100	%																				100	%	
			Percentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	100	%																				100	%	
			Pembayaran jasa tangga (torreng/torreng) pemerintah	12 Bulan			344.300.000	12	Bulan																12	Bulan	344.300.000	
			Percentase jasa pelayanan umum kantor yang tersedia sesuai kebutuhan					100	%	291.841.200	100	%	291.841.200	100	%	291.841.200	100	%	331.841.200	100	%	1.208.984.000						
	217012.09	Kegiatan Pemeliharaan Bengkel Milik Dinas Penanggung Urusan Pemerintahan Dinas	Percentase Tersedianya Penanggung Urusan Pemerintahan Dinas	100%	100	%	282.400.000																		100	%	282.400.000	

				Terpilihannya burung milik daerah penunjuk urusan pemerintah daerah	100%				100	%	412.400.000	100	%	208.668.620	100	%	239.461.268	100	%	261.920.861	100	%	346.064.938	100	%	1458.415.671			
			2.17.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyelidikan dan Pemahaman, Biaya Pemahaman dan Pengelolaan Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jokowi	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpilihnya	16 Unit	16 Unit	Unit	155.400.000			-												16 Unit	Unit	165.400.000			
				Persentase Penyalihannya Penitens Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100	%				100	%	-	100	%									100	%	100	%		
				Terpilihannya Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100	%				-													100	%				
				Jumlah Kendaraan Dinas/penempatan/john en yang terpilihnya pajak dan pemahamanannya	16 Unit				16	Unit	200.400.000													16	Unit	200.400.000			
				Jumlah Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jokowi yang terpilihnya pajak dan pemahamanannya sesuai Rencana						10	Unit	99.138.835	16	Unit	110.304.247	16	Unit	122.348.568	16	Unit	185.374.708	16	Unit	517.086.358					
			2.17.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemahaman Pendekatan dan Macin Leimanya	Jumlah pendekatan dan macin leimanya terpilihnya	111 Unit			111	Unit	50.000.000													111	Unit	50.000.000			
				Persentase Pemahaman pendekatan dan macin leimanya yang dipilihnya sesuai rencana						100	%	42.742.000	100	%	45.947.650	100	%	49.393.724	100	%	53.099.232	100	%	191.101.627					
			2.17.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemahaman/Rehabilitasi Sosial dan Prosesus Gedung Kantor atau Bangunan Leimanya	Persentase Terpilihannya Pengangkutan Gedung Kantor	100%	100	%	127.000.000															100	%	127.000.000			
				Persentase terpilihnya jasa perbaikan pendekatan leimanya	100%	100	%																	100	%				

			Kantor																
			Jumlah poket surson dan presensia gedung kantor yang terpilih/rehabilitasi yg berada di dalam gedung	J Poket			3 Gedung	102.000.000									3 Gedung	102.000.000	
			Persentase Surson dan Presensia Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipilih/direhabilitasi yg berada di dalam gedung						100	%	34.887.785	100	%	48.982.688	100	%	43.406.534	100	%
																	68.162.070	100	%
																	160.551.530		
	2170120911	Pembangunan Rehabilitasi Surson dan Presensia Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah poket surson dan presensia pendidikan gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpilih/rehabilitasi yg berada di dalam gedung	J Poket			3 Gedung	60.000.000									3 Gedung	60.000.000	
			Persentase Surson dan Presensia Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipilih/direhabilitasi yg berada di dalam gedung						100	%	31.820.000	100	%	34.206.900	100	%	36.771.900	100	%
																	39.529.800	100	%
																	110.502.374		
tingkatan Perni tha Miski dan peran dalam rekonomian			Pertumbuhan Koperasi yang Berkualitas					2,91	%		3,24	%		3,60	%		3,88	%	
																	4,65	%	
																	18,16	%	
			Meningkatnya koperasi kalembeaan Koperasi					Persentase Koperasi Berkualitas			4	%		4,6	%		8	%	
																	8,5	%	
																	6	%	
																	6	%	
	21703	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkualitas	20%	65,40	%	99.660.000										63,4	%	99.660.000
			Persentase Koperasi Berkualitas RAT	24,35%				4,87	%	361.895.000							4,87	%	361.895.000
			Jumlah Koperasi berkualitas yang melaikkan RAT dibagi Total Koperasi dikali 100%																

				2. Jumlah Koperasi yang diluncurkan dan terdaftarnya	40 Koperasi	40	Koperasi											40	Koperasi	Jumlah Koperasi yang diluncurkan dan terdaftarnya			
				Jumlah Koperasi orang yang mengeluti Bisnis ini Peraturan dan Perundang undangan koperasi	90 Koperasi				90	Koperasi	361.895.000								90	Koperasi	361.895.000	Jumlah Koperasi yang mengeluti Bisnis ini Peraturan dan Perundang undangan koperasi	
				Jumlah Koperasi yang diluncurkan dan terdaftarnya terhadap Peraturan dan Perundang undangan koperasi	90 Koperasi				90	Koperasi	302.084.500	90	Koperasi	488.385.000	90	Koperasi	488.385.000	90	Koperasi	488.385.000	Jumlah Koperasi yang diluncurkan dan terdaftarnya terhadap Peraturan dan Perundang undangan koperasi		
				Jumlah Koperasi yang diluncurkan dan terdaftarnya terhadap Peraturan dan Perundang undangan koperasi	90 Koperasi				90	Koperasi	254.770.000										1.787.239.500		
	21705	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi Aktif	69,5%	70	%	462.491.260	75,36	%									75,36	%	697.261.260	Jumlah Koperasi Aktif dibagi Total Koperasi dikali 100%	
				Persentase Koperasi Aktif yang memiliki kinerjanya	10%						14,80	%	462.660.000	20,50	%	462.660.000	26,20	%	462.660.000	31,90	%	462.660.000	31,90 %
		21705.201	Registan, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Legititas Usaha bagi KUM	20%	70	%	462.491.260											70,00	%	462.491.260	Jumlah Legititas Usaha Bagi Koperasi Usaha Mikro dibagi Total Koperasi dikali 100%	

				Persentase Masing-Masing Kepesantren SDM Pengurus, Pengople, pengajar dan anggota Kopernasi	4,9%				13,90	%	234.770.000	18,00	%	462.660.000	23,20	%	462.660.000	28,50	%	462.660.000	33,90	%	462.660.000	33,90	%	2.085.410.000	Jumlah kepesant nen yang masing-masingnya Kepesantren SDM Pengurus, Pengople, pengajar dan anggota Kope nasi dibagi Total Kopernasi dikali 100%		
				Persentase Masing-Masing Kepesantren SDM Pengurus, Pengople, pengajar dan anggota Kopernasi																					0				
	21170620101	Sub Kepesantren Peningkatan Pemahaman dan Pengembangan Perkembangan Serta Kepesantrenan dan Kompetensi SDM Kopernasi	Dumlah Kelompok Mayarakat yang mengaplikasikan Badan Hukum Kopernasi	3 Kelompok Baru	3	Kelompok Baru	462.491.250																		3	Kelompok Baru	462.491.250	Jumlah Kelompok Mayarakat Baru yang mengaplikasikan Badan Hukum Kopernasi	
			Jumlah Kopernasi	523 Kopernasi	523	Kopernasi																			523	Kopernasi		Jumlah Kopernasi	
			Jumlah SDM Kopernasi dan UMK yang masing-masingnya	60 Kopernasi dan UMK	60	Kopernasi dan UMK																			60	Kopernasi dan UMK		Jumlah SDM Kopernasi dan UMK yang masing-masingnya	
			Jumlah SDM Kopernasi/Orang yang mengaplikasikan pendidikan dan pelatihan	120 orang				210	Orang	234.770.000														210	Orang	234.770.000	Jumlah SDM Kopernasi/Orang yang mengaplikasikan Pendidikan dan Pelatihan		
			Jumlah SDM Kopernasi yang mengaplikasikan pendidikan dan pelatihan	120 orang				210	Orang	462.660.000	210	Orang	462.660.000	210	Orang	462.660.000	210	Orang	462.660.000	210	Orang	462.660.000	340		1.850.640.000	Jumlah SDM Kopernasi yang mengaplikasikan Pendidikan dan Pelatihan			

			PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah terfotifikasi: permohonan																			Jumlah Koperasi yang terfotifikasi permohonan dibagi Total Koperasi dikali 100%
			Persentase Koperasi yang mengikuti Usahanya sejauh Profesional	4,87%					6,49%	%	46186.000												Jumlah Koperasi yang mengikuti Usahanya sejauh profesional dibagi Total Koperasi dikali 100%
			Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembinaan, pemasaran, pendampingan kalibrasi dan usaha, dan kemitraan untuk koperasi dengan volieth keanggotaan dalam desa/kabupaten/kota (%)						6,00	%	196.167.000	7,00	%	346.260.500	10,00	%	396.334.000	12,50	%	296.334.000	12,50	%	1.081.270.500
		517062.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Mengintegrasikannya dalam Desa/kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang berkembang usahanya	16,23%	70	%	55.000.000	8,12	%	46.186.000												Jumlah Koperasi yang meningkat kelas permohonan, pemasaran produk dan kualitas SDM dibagi Total Koperasi dikali 100%
			Persentase Koperasi yang dibina Usaha, Pemasaran, Akses Pembinaan, Pengujian Kalibrasi, Penetapan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	6,23%					11,73	%	196.167.000	17,35	%	346.260.500	25,03	%	396.334.000	28,83	%	296.334.000	28,83	%	1.036.086.500

		Pembentukan Ketekungan Perencana dan Pengembangan Usaha Mikro	Pengembangan UMKM																				
		Jumlah WBB yang mendapat Pengembangan	15 wbb	1	Kelompok																		
		Tercapattnya Wirausaha Baru	635 wbb	200	WBB																		
		Jumlah pembiayaan dan pengembangan Usaha Mikro		240	Usaha Mikro	858.290.250													858.290.250				
		Jumlah Usaha Mikro yang di berdayakan dalam pengembangan potensinya	426 usaha mikro				350	Usaha Mikro	402.709.221	340	Usaha Mikro	902.709.221,00	310	Usaha Mikro	902.709.221,00	310	Usaha Mikro	902.709.221,00	1006	Usaha Mikro	3.610.036.900		
21708	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase KUMKM yg terdadic senara usaha dan permodalannya	60%	60	%	474.765.000												60	%	474.765.000			
		Persentase siktor usaha mikro menjadi usaha kecil	0,60%			0,5	%	1.093.979.000										0,6	%	1.093.979.000			
		Pertambahan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0,10%						0,20	%	1.071.603.400	0,30	%	1.071.603.400	0,40	%	1.071.603.400	0,60	%	1.071.603.400	190	%	4.386.013.600
17.08.2.01	Negosiasi Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Siktor Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase KUMKM yang terdadic senara usaha dan permodalannya	60	%	474.765.000												60	%	474.765.000				
		Meningkatnya orientasi siktor usaha mikro menjadi usaha kecil		176	Usaha Mikro	1.093.979.000											176	Usaha Mikro	1.093.979.000				
		Jumlah usaha mikro mengjadi usaha kecil	3730 usaha kecil				626	Usaha Mikro	1.071.603.400	626	Usaha Mikro	1.071.603.400	626	Usaha Mikro	1.071.603.400	476	Usaha Mikro	1.071.603.400	2206	Usaha Mikro	4.386.013.600		

		17.00.2.01.01	Sub Anggaran Perusataan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Penyembelahan Produk dan Pengolahan. Pemasaran, SDM, sertifikasi Dewan dan Teknologi	Jumlah Produk UHLM yang terproduksi		200	UHLM	414.155.000								200	UHLM	414.155.000				
				Jumlah usaha mikro yang terdokumentasi		35.520	Usaha Mikro	1.093.979.000									35.520	Usaha Mikro	1.093.979.000			
				Jumlah usaha mikro yang terdokumentasi penyeimbangannya		525	Usaha Mikro	1.071.503.400	525	Usaha Mikro	1.071.503.400	525	Usaha Mikro	1.071.503.400	475	Usaha Mikro	1.071.503.400	2575	Usaha Mikro	4.236.012.600		
untingkan menyampaikan informasi			Persentase Tenaga Kerja Yang diempatkan (Dalam dan Luar Negeri)		23	%	23.4	%	22.8	%	23.2	%	23.8	%	23.8							
		207.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Besaran Pencairi Kerja yang terdokter yang diempatkan		616	Orang		630	Orang		656	Orang		683	Orang	612	Orang	2796	Orang		
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Terpenuhinya Pencairan Uraian Tenaga kerja		100	%	100.000.000									100	%	100.000.000			
				Persentase kigitan yang dilaksanakan mengikuti ke sesama tenaga kerja (%)					100	%	213.664.000	100	%	200.000.000	100	%	200.000.000	100	%	813.664.000		
		2.07.02.2.01	Penyalinan Rancana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja		100	%	100.000.000		30	Dokumen	213.664.000	30	Dokumen	200.000.000	30	Dokumen	200.000.000	100	%	813.664.000	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja																		

			Jumlah Dokumen Penilaian Tengah Karya						30	Dokumen	213.664.000	30	Dokumen	200.000.000	30	Dokumen	200.000.000	30	Dokumen	200.000.000	100	%	813.664.000				
		1.07.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rancangan Tengah Karya Mliror	Jumlah Dokumen Rancangan Tengah Karya Mliror				1.00	Dokumen	100.000.000											1.00	Dokumen	100.000.000				
		1.07.02.2.01.02	Penyusunan Rancangan Tengah Karya Mliror	Jumlah Dokumen Rancangan Tengah Karya Mliror					30	Dokumen	213.664.000	30	Dokumen	200.000.000	30	Dokumen	200.000.000	30	Dokumen	200.000.000	30	Dokumen	213.664.000				
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penyusunan Tengah Karya	20%	20	%	288.760.000	22,40	%	548.000.000										22,40	%	856.760.000				
				Persentase Tengah Karya Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)	0,04%						0,042	%	1.164.674.000	0,06	%	1.378.000.000	0,06	%	1.963.000.000	0,076	%	2.088.600.000	0,076	%	6.684.074.000		
				Pertambahan tingkat produktivitas tengah karya (%)							2,6	%									2,6	%					
		2.07.03.2.01	Registasi Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Kompetensi	Persentasi Penyeri Karya Yang Memiliki Keterampilan Kunci	39,69%	60	%	247.000.000	60	%	443.000.000	60	%	1.061.384.000	60	%	1.265.000.000	60	%	1.835.000.000	60	%	1.966.000.000	60	%	6.802.384.000	
		2.07.03.2.01.01	Sub Kegiatan Proses Pendidikan Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyeri Karya berdasarkan Klasifikasi Kompetensi	Jumlah Penyeri Karya yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Karya	32 Org	32	Org	247.000.000													32	Org	247.000.000				
				Jumlah Tengah Karya yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pengembangan Sistem Kinerja				48	Org	443.000.000											48	Org	443.000.000				
				Jumlah Tengah Karya yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pengembangan Sistem Kinerja (jumlah Penyeri yang mengikuti pendidikan berdasarkan klasifikasi kompetensi)						64,00	Org	482.364.000	80,00	Org	603.000.000	96,00	Org	803.000.000	112	Org	922.000.000	421	Org	2.393.364.000			

		2.07.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kepesantren dengan Sektor Swasta untuk Pengembangan Instruktur serta Sosialisasi Dan Penerapan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah lembaga pelatihan kerja dan sektor swasta yang berkerjasama						3 Lembaga Pelatihan	18.000.000	5 Lembaga Pelatihan	30.000.000	5 Lembaga Pelatihan	30.000.000	7 Lembaga Pelatihan	45.000.000	20 Lembaga Pelatihan	120.000.000		
		2.07.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan Sosialisasi Lembaga Pelatihan Kerja Kab/Kota	Jumlah Sosialisasi pelatihan kerja	3 puket					1 Puket	550.000.000	1 Puket	550.000.000	1 Puket	1.000.000.000	1 Puket	1.000.000.000	4 Puket	3.100.000.000		
		2.07.03.2.02	Kegiatan Pemberian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pencair Kerja yang memiliki keterampilan kerja	60 %		41.760.000											60 %	41.760.000		
				Persentase LPKS yang memahami peraturan akademik	60%			100 %		66.000.000	100 %	69.346.000	100 %	66.000.000	100 %	66.000.000	100 %	66.000.000	100 %	279.446.000	
		2.07.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pemberian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang memahami peraturan akademik	20 LPKS	20 LPKS	41.750.000											20 LPKS	41.750.000		
				Jumlah LPKS yang mengalami kemandirian				20 LPKS	55.000.00									20 LPKS	55.000.00		
				Jumlah LPKS yang yang aktif						20 LPKS	59.346.000	20 LPKS	55.000.000	20 LPKS	55.000.000	20 LPKS	55.000.000	20 LPKS	224.346.000		
		2.07.03.2.05	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produktivitas bagi Tenaga Kerja	50%			60 %		60.000.000	60 %	63.846.000	60 %	60.000.000	60 %	68.000.000	60 %	68.000.000	20 LPKS	297.346.000	
		2.07.03.2.05.01	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pelaku yang mempunyai Produktivitasnya				20 Orang	50.000.00	20 Orang	53.846.000	20 Orang	60.000.000	20 Orang	65.000.000	20 Orang	68.000.000	20 LPKS	297.346.000		
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencair Kerja yang memiliki keterampilan kerja	18.6% 18.89 %		506.880.000											18.6% 18.89 %	506.880.000		
				Persentase Jumlah Pencair Kerja yang ditempatkan	18.6%			18 %		486.040.000								18 %	486.040.000		

				Percentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan antar Kerja dalam Wilayah Rintas (%)	16,50%					22,40	%	612.664.000	22,80	%	743.640.000	23,20	%	792.280.000	23,60	%	841.380.000	23,80	%	2.889.864.000		
		2.07.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Antarkeja di Dalam Kabupaten/Kota	Percentase Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal	7,71%	7,94	%	304.480.000															7,94	%	304.480.000	
				Percentase Pemenuhan kerja yang membutuhkan Pemenuhan Tenaga Kerja	100%				100	%	218.240.000												8	%	218.240.000	
				Percentase Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal	7,94%						8,2	%	226.198.000	8,4	%	422.840.000	8,6	%	446.480.000	8,7	%	470.480.000	8,70	%	1.668.938.000	
		1.07.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SMK yang terwadilahkan Bantuan kerja khusus (BKK)					15	SMK	10.000.000												15	SMK	10.000.000	
				Jumlah SMK yang Memberikan Layanan Antar Kerja							15	SMK	9.845.000	15	SMK	10.000.000	15	SMK	10.000.000	15	SMK	10.000.000	15	SMK	10.000.000	
		2.07.04.3.01.03	Sub Kegiatan Pelayanan dan Bimbingan Jabatan bagi Pemuda Kerja	Jumlah Pemuda Kerja yang mengikuti pelatihan di Perusahaan	20 org	20	Org	134.600.000															20	Org	134.600.000	
				Jumlah civitas yang membutuhkan Bimbingan Jabatan Pemerintah					100	Org	36.000.000												100	Org	36.000.000	
				Jumlah Pemuda yang membutuhkan Bimbingan Jabatan						100	Org	36.445.000	100	Org	36.000.000	100	Org	36.000.000	100	Org	36.000.000	100	Org	148.445.000		

				jumlah responden yang menerima Bimbingan Jobdesk																							
			2.07.04.2.01.05	Sub Kegiatan Perbaikan Karakteristik Kerja	Jumlah Pemohon Kerja yang diluluskan untuk berkerja di Sektor Usaha Mandiri (Informal)	80 WIB	40	Org	169.000.000																		
				Jumlah Pemohon Kerja yang Mengajukan Pemanggilan Dalam Bilangan Formal dan Informal			24	Org	169.240.000																		
				Jumlah Pemohon Kerja Yang Mengajukan Pemanggilan Dalam Bilangan Formal dan Informal Kerja/ Menguruskan yang Dilulus Karena peluhuan Karya Swasta	20 org					40	Org	177.840.000	50	Org	376.840.000	50	Org	400.480.000	50	Org	404.480.000	208	Org	1.379.648.000			
			2.07.04.2.03	Hagiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja di sektor formal	9,9%	16,89	%	202.400.000	24,17	%	370.800.000	26,10	%	-	38,00	%	0	30,00	%	0	32,00	%	0	16,89	%	473.200.000
				Audit Sertifikasi Iso	1 Sertifikat ISO							1,00	Sertifikat ISO	286.616.000	1,00	Sertifikat ISO	320.800.000	1,00	Sertifikat ISO	346.800.000	1,00	Sertifikat ISO	370.800.000	1	Sertifikat	1.323.916.000	
			2.07.04.2.03.02	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penyediakan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah buku Laporan Informasi Pasar Kerja	57 copy	57	Exemplar	54.400.000																		
				Audit Sertifikasi Iso	1	1	Sertifikat ISO			1	Sertifikat ISO	97.000.000															
				Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja						19	Laporan	97.000.000	19	Laporan	97.000.000	19	Laporan	97.000.000	19	Laporan	97.000.000	19	Laporan	97.000.000	19	Laporan	391.200.000

		207042.01.03	Sub Kegiatan Job Fair	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di luar negeri	0	500	Org	148.000.000	515	Org	173.000.000										1015	Org	331.000.000			
				Jumlah Penerima yang mendapat informasi Bantuan Tenaga Kerja	0						500	Org	188.719.000	545	Org	233.000.000	560	Org	248.000.000	575	Org	273.000.000	580	Org	932.719.000	
		Meningkatnya Perusahaan yang mensejahterakan kelaik kerja yang leylak (PP/PKE, LKS Bipartit, Strukturn Skala upah dan Pendaftr Paser BPJS Ketangguhan)	Percentase Perusahaan yang mensejahterakan kelaik kerja yang leylak (PP/PKE, LKS Bipartit, Strukturn Skala Upah dan Pendaftr Paser BPJS Ketangguhan)		6	%			7	%		9	%		11	%		13	%		13	%				
		20705	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Percentase Kasus yang Disaleksikan	100%	60	%	299.600.000	100	%	297.476.000										100	%	697.076.000	Percentase Kasus yang Disaleksikan dibagi jumlah kasus yang masuk di bali 100		
				Percentase Perusahaan yang mensejahterakan kelaik kerja yang leylak (PP/PKE, LKS Bipartit, Strukturn Skala Upah, dan terdaftar paserin BPJS Ketangguhan) (%)	29,30%						7	%	328.387.000	9	%	356.387.000	11	%	384.387.000	13	%	412.387.000	13	%	1.481.542.000 Bilangan HI + PP-PKE+LKS Bipartit + SSB+ Pekerja terdaftar BPJS TK dibagi jumlah perusahaan di Banjarmasin) X 100	
		20705.201	Kegiatan Pengabdian Pertama Perusahaan dan Pendaftran Perjanjian Kerja Berjangka untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Kasus yang Disaleksikan	100%	60	%	187.985.000													60	%	187.985.000	Percentase Kasus yang Disaleksikan dibagi jumlah kasus yang masuk di bali 100		

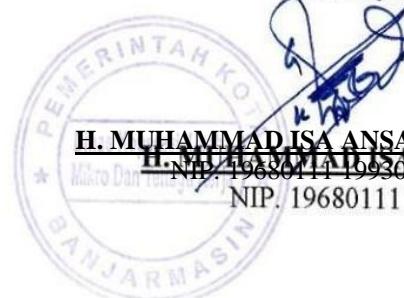
				Persentase Perusahaan yang memerlukan tata kelola kerja yang lemah (PP/PKE, LKS/Espirit, Struktur Skala Upah, dan teknologi pascaan BPJS Ketenagakerjaan)	10,86%			20	%	187.986.000							20	%	187.986.000	bimtek peningkatan kapasitas lks bisnis 70 + bimtek tata cara pencairan sp/ab 7					
				Persentase Perusahaan yang memerlukan dan melaksanakan Sosnia Hubungan Industrial	10,86%				15	%	209.986.000	20	%	281.986.000	26	%	283.986.000	30	%	275.986.000	30	%			
			2.07.05.2.01.02	Sub Kegiatan Pendukung Pengembangan Kerjasama bagi Perusahaan	Bentuk Sosnia Hubungan Industrial (Pekerja)	132	35	Pekerja	39.450.000											35	Pekerja	39.450.000			
				Bentuk Sosnia Hubungan Industrial (Perusahaan)	132	40	Perusahaan				0										35	Pekerja	39.450.000		
				Jumlah pekerja/pelaku yang memahami pentingnya PP/PKE serta mengerti bagaimana tata cara pembuatan PP/PKE	132			35	Pekerja	39.450.000										35	Pekerja	39.450.000			
				Jumlah Perusahaan yang memerlukan tata cara pembuatan PP/PKE	132						140	Perusahaan	45.450.000	150	Perusahaan	51.450.000	160	Perusahaan	57.450.000	170	Perusahaan	63.450.000	180	Perusahaan	217.800.000
			2.07.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan Pendekatan dan Informasi Sosnia Hubungan Industrial dan Jaminan sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	1.Jumlah Pekerja yang memahami Strukturn Skala Upah/ SISB/S/ IMF/ UMK	791	100	Pekerja	148.535.000											100	Pekerja	148.535.000			
				2. Jumlah Perusahaan yang memahami Strukturn Skala Upah/ SISB/S/ IMF/ UMK	791	100	Perusahaan															Jumlah pekerja/pelaku yang memahami strukturn skala upah dan Jaminan Sosial			
				3. Penentuan SK Upah Minimum Kota.	1 Dokumen	1	Dokumen															Jumlah SK Upah Minimum Kota.			
				Jumlah pekerja/pelaku yang memahami strukturn skala upah dan Jaminan Sosial	791			65	Pekerja	148.535.000										65	Pekerja	148.535.000			

			Jumlah Perusahaan yang memahami struktur dan simbol upaya, Manajemen UMK dan Kepatuhan Jaminan Sosial	791	Perusahaan				150	Perusahaan	164.535.000	160	Perusahaan	100.535.000	170	Perusahaan	196.535.000	100	Perusahaan	210.535.000	1516	Perusahaan	754.140.000	Jumlah Perusahaan yang memahami struktur dan simbol upaya, Manajemen UMK dan Kepatuhan Jaminan Sosial		
		2.07.05.2.02	Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Penilaian Hubungan Industrial, Negosiasi dan Penutupan Perusahaan di Dalam Kabupaten/Kota	Percentase Kesus yang Disalesekan	100%	60 %		111.615.000														60 %	111.615.000	Percentase Kesus yang Disalesekan dibagi jumlah kesus yang masuk dikali 100		
			Percentase Pelajar/Pengusaha yang memahami penilaian PHI/PHK	24,69%				85 %		109.490.000												85 %	109.490.000	Jumlah Pelajar/Pengusaha yang memahami penilaian PHI/PHK dibagi jumlah perusahaan yang ada di Bumarmas		
			Percentase perusahan penilaian hubungan industrial	15,29%					16 %		118.402.000	14 %		124.402.000	15 %		130.402.000	12 %		126.402.000	13 %		509.608.000	1. Jumlah Perusahaan yg memahami tatacas penerapan PHI / Jumlah Perusahaan di BUM 2. Jumlah SP/SB yang Terverifikasi/ Jumlah SP/SB di BUM		
		2.07.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Penilaian Hubungan Industrial, Negosiasi dan Penutupan Perusahaan yang berdiksi / Berdampak pada Kewajiban di 1 (satu) Dinas Kabupaten/Kota	1. Sosialisasi Test Case Penilaianan PHI/PHK atau Pengabdian mahasiswa dalam (Pelajar).	24,69%	35	Pelajar	29.125.000				0										35	Pelajar	39.125.000	Jumlah Pelajar/Pengusaha yang memahami penilaian PHI/PHK dibagi jumlah perusahaan yang ada di Bumarmas	
			1. Sosialisasi Test Case Penilaianan PHI/PHK atau Pengabdian mahasiswa dalam (Perusahaan)	24,69%	40	Perusahaan				0															Jumlah Pelajar/Pengusaha yang memahami penilaian PHI/PHK dibagi jumlah perusahaan yang ada di Bumarmas	

			Jumlah Pelaku Pengusaha yang memahami core perusahaan PHU/PHK & hukum dan di dalam pengadilan HI	24.69%			50 Pelaku/Pengusaha	29.125.000							50 Pelaku/Pengusaha	29.125.000	
			Jumlah Perusahaan yang memahami core perusahaan PHU/PHK & hukum dan di dalam pengadilan HI	24.69%			120 Perusahaan	38.037.000	130 Perusahaan	44.037.000	140 Perusahaan	50.037.000	150 Perusahaan	56.037.000	630 Perusahaan	188.148.000	
	2.07.05.2.02.02	Sub Kegiatan Penerapan Peraturan Hukum dan Industri, Kewajiban dan Perintah Perusahaan yang berlaku / Berlakupada Kewajiban di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	I. Sosialisasi Tata Cara Perubahan Peraturan Perusahaan/Perijinan Kewajibana Perusahaan;	370 Perusahaan	30 Pelaku	0.125.000		0							30 Perusahaan	0.125.000	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan/Perijinan Kewajibana
			I. Sosialisasi Tata Cara Perubahan Peraturan Perusahaan/Perijinan Kewajibana Perusahaan;	370 Perusahaan	30 Pelaku			0							30 Pelaku		Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan/Perijinan Kewajibana
	2.07.05.2.01.03	Sub Kegiatan Penerapan Verifikasi dan Rekomendasi Kewajibana pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Sektor Pelaku Bisnis Buruh Gvert Non Afliasi	Dokumen LKS Biperit	17 Dokumen	3 Dokumen	0.125.000		0							3 Dokumen	0.125.000	Jumlah Dokumen LKS Biperit
			Jumlah Anggota Sektor Pelaku/sector Buruh yang telah terverifikasi	0			10 Sektor Pelaku/Sektor Buruh	2.125.000							10 Sektor Pelaku/Sektor Buruh	2.125.000	Jumlah Anggota Sektor Pelaku/sector Buruh yang telah terverifikasi
			Jumlah Anggota Sektor Pelaku/sector Buruh yang telah terverifikasi	0			10 SP/BB	2.125.000	10 SP/BB	2.125.000	10 SP/BB	2.125.000	10 SP/BB	2.125.000	10 SP/BB	8.500.000	Jumlah Anggota Sektor Pelaku/sector Buruh yang telah terverifikasi

		2 UU 05/2004	Dua Laporan Pemasukan Operasional Lembar Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Pemasukan yang memahami Peraturan Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/kota	500	Perusahaan	20	Pemasukan	78.240.000											20	Pemasukan	78.240.000	Jumlah pemasukan dan jumlah peningkatan koperasi kls koperasi + jumlah tan tan peningkatan sp/ob	
				Jumlah Penghasilan yang memahami Peraturan Kerjasama Tripartit	600	Perusahaan	40	Pemasukan																Jumlah pemasukan dan jumlah peningkatan koperasi kls koperasi + jumlah tan tan peningkatan sp/ob
				Jumlah Rekomendasi berikan pertimbangan soaln terhadap penyusunan kebijakan dalam manajag permasalahan kewarganegaraan	1	Laporan	78.240.000													1	Laporan	78.240.000	Jumlah laporan pertimbangan soaln terhadap penyusunan kebijakan dalam manajag permasalahan kewarganegaraan	
				Jumlah laporan pertimbangan soaln terhadap penyusunan kebijakan dalam manajag permasalahan kewarganegaraan	1	Laporan			78.240.000	1	Laporan	78.240.000	1	Laporan	78.240.000	1	Laporan	78.240.000	1	Laporan	78.240.000	Jumlah laporan pertimbangan soaln terhadap penyusunan kebijakan dalam manajag permasalahan kewarganegaraan		
umiah					14.219.044.031		17.687.686.913		16.129.640.416		16.978.539.714		17.671.626.185		22.717.889.761									

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
Ketenagakerjaan**
Kota Banjarmasin
Naga Kerja



H. MUHAMMAD ISA ANSARI, SE., M. AP.
H. MUHAMMAD ISA ANSARI, SE., M.AP.
NIP. 19680111 199303 1 006

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk memberikan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja maka diperlukan sebuah indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lima tahun yang akan datang.

Revisi Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode selama 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UMKM serta berpedoman kepada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, yang mana memuat Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota serta Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Kota Banjarmasin 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mensinergikan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dengan program dan kegiatan, ada beberapa Indikator Kinerja Utama yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Persentase Wirausaha baru yang Mandiri;
2. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri);
3. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja;
4. Terselesaikannya Sengketa Permasalahan Ketenagakerjaan, dan

5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.

Berikut merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai peta perwujudan komitmen Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang diuraikan lebih lanjut dalam pada tabel T-C 28 sebagai berikut:

Tabel T-C 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu
Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun Indikator							Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Persentase Wirausaha baru yang Mandiri	2%			3%	3,5 %	4%	4,5 %	5%	5%
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	16,16 %			22	22,4	22,8	23,2	23,8	23,8
Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	77,18			78 (BB)	78,5 (BB)	79(BB)	79,5(BB)	80(A)	80(A)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun 2021-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, Uaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Dengan disusunnya renstra ini diharapkan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka untuk mewujudkan Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin periode 2021-2026 diharapkan seluruh komponen yang terkait untuk saling mendukung dan bekerjasama.